GERAKAN AKSI “PEOPLE POWER” PASCA PILPRES 2019

(Analisis Teori Kuasa Michel Foucault)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Sebagian

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program

Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh :

Aldhy Farabi Arifian

(E01215004)

PROGRAM STUDI AQIDAH FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama: Aldhy Farabi Arifian

NIM : E01215004

Prodi : Aqidah Filsafat Islam

Judul Skripsi : GERAKAN AKSI "PEOPLE POWER" PASCA PILPRES 2019 (Analisis Teori Kuasa Michel Foucault)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Desember 2019

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Aldhy

NIM: E01215004

Scanned with CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "GERAKAN AKSI "PEOPLE POWER" PASCA PILPRES 2019 (Analisis Teori Kuasa Michel Foucault)" yang ditulis oleh Aldhy Farabi Arifian ini telah disetujui untuk diujikan pada:

Surabaya, 31 Desember 2019

Pembimbing 1

Dr. Suhermanto, M.Hum
NIP. 196708201995031001

Pembimbing 2

Muchammad Helmi Umam, S. Ag, M.Hum
NIP. 197905042009011010

Scanned with CamScanner

iii

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **GERAKAN AKSI "PEOPLE POWER" PASCA PILPRES 2019 (Analisis Teori Kuasa Michel Foucault)** yang ditulis oleh Aldhy Farabi Arifian ini telah diuji di depan tim penguji skripsi pada tanggal 13 Januari 2020

Tim Penguji:

1. Dr. Suhermanto, M.Hum (Ketua) :.....
2. Muchammad Helmi Umam, M.Hum (Sekertaris) :.....
3. Drs. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag (Penguji 1) :.....
4. DR. Tasmuji, M.Ag (Penguji 2) :.....

Surabaya, 13 Januari 2020

Dekan,

Dr. Kunawi M. Ag

NIP. 196409181992031002

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALDHY FARABI ARIFIAN
NIM : E01215004
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT / AFI
E-mail address : aldhyfarabi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
GERAKAN AKSI "PEOPLE POWER" PASCA PILPRES 2019 (Analisis Teori Kuasa Michel Foucault)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2020

Penulis

(ALDHY FARABI A)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Gerakan Aksi "People Power" Pasca Pilpres 2019

(Analisis Teori Kuasa Michel Foucault)

Oleh:

Aldhy Farabi Arifian

NIM. E01215004

Abstrak: Indonesia di 2019 melaksanakan sebuah demokrasi yakni pilpres 2019. Pemilihan presiden itu dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan terdapat dua pasangan yang mencalonkan diri. 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno semua masyarakat Indonesia dengan serentak memilih pada tanggal 17 April 2019 dengan damai. Dalam penghitungan KPU di menangkan oleh pihak 01. Dan pihak 02 mengklaim bahwasannya KPU bertindak curang. maka dari itu timbul gerakan aksi *People Power* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sebuah kecurangan pada pilpres 2019. Dan gerakan itu menjadi sangat viral dikalangan para pengamat politik dan juga di seluruh media khusunya di Indonesia. *People Power* sendiri mempunyai makna penggulingan atas kekuasaan terhadap pemerintah yang bertindak otoriter. Tetapi di 2019 ini makna itu dirubah untuk tujuan berdemonstrasi terhadap KPU karena bertindak tidak adil dengan memobilisasi massa terhadap masyarakat bahwasannya pilpres 2019 telah terjadi kecurangan secara tekstuktur, sistematis dan massif. Gerakan itu dipicu oleh para kelompok yang mempunyai kekuasaan di dalam ruang lingkupnya dengan tujuan untuk membuat kekacauan di dalam pilpres 2019 karena merasah tidak puas dengan hasil penghitungan KPU. Peneliti ini akan menggunakan pisau analisis Teori Kuasa Michel Foucault yang hasilnya akan menganalisa gerakan people power 2019 yang di munculkan oleh kalangan elite politik yang memang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi itu adalah semacam strategi yang dilakukan penguasa untuk mengatur semuanya dalam memobilisasi masyarakat tertentu.

Kata Kunci: People Power, Pilpres 2019 dan Teori Kuasa Michel Foucault.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

HALAMAN JUDUL....…….....i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN…….....ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……....….....iii

HALAMAN PENGESAHAN…….....iv

MOTTO…….…….....v

HALAMAN PERSEMBAHAN…….....vi

ABSTRAK…….....ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xiii

BAB I: PENDAHULUAN…….....1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian.....12

D. Kegunaan Penelitian.....12

E. Kajian Pustaka…….. .. …….....13

F. Kerangka Teori..…….....16

G. Metode Penelitian…….....22

a. Pendekatan……. ...……..…….....23

1. Jenis penelitian.....20

2. Sumber data.....20

3. Tekhnik Pengolahan Data.....21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan…….....23

BAB II: BIOGRAFI, KARYA DAN TEORI KUASA FOUCAULT.....24

A. Riwayat Hidup….....……..…….....24

B. Karya-karya.....…….....25

C. Teori Kuasa Michel Foucault.....…….....27

1. Sejarah lahirnya Teori Kuasa Michel Foucault.....27
2. Definisi dan Strategi Teori Kuasa.....31
3. Tebel Teori Kuasa Michel Foucault.....36

BAB III: DINAMIKA AKSI PEOPLE POWER PASCA PILPRES 2019.....41

A. Lahirnya suatu Demokrasi di Indonesia..…….....41

B. Sejarah People Power di Indonesia.....44

C. Penyebab Gerakan Aksi People Power Pasca Pilpres 2019….....46

D. Bagaimana terjadinya Gerakan People Power 2019.....50

E. Dampak Aksi People Power 2019.....57

BAB IV: ANALISIS…...…….....62

A. Aktor di Balik Aksi Gerakan People Power 2019…….....62

B. Kompetensi Aktor dalam Gerakan People Power 2019.....67

C. Pandangan Teori Kuasa Michel Foucault Terhadap Aksi "People power" 2019.....72

BAB V: PENUTUP…….....82

A. Kesimpulan.....82

B. Saran…….....86

C. Daftar Pustaka…….....87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah bersepakat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan demokrasi, demokrasi menjadi pijakan utama di suatu negara dalam memberikan kekuasaan secara mutlak kepada rakyat dalam menentukan prioritas hidup untuk dapat berpatisipasi dalam memajukan bangsanya sendiri. Demokrasi merupakan suatu kedaulatan rakyat yang selama ini menjadi prinsip yang selalu dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Kedaulatan rakyat sendiri adalah erat hubungannya dengan asas permusyawaratan perwakilan, sebab asas kedaulatan rakyat akan dilaksanakan dengan melalui asas permusyawaratan perwakilan atau sebaliknya / sedangkan asas permusyawaratan perwakilan dinyatakan dari kalimat yang kedua yaitu dilakukan sepenuhnya oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR inilah yang merupakan penjelmaan dari rakyat dan akan memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya.[1]

[1] Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Jakarta : Penerbit PT RINEKA CIPTA, 1990), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Penulis tahun 2019 adalah tahun yang sangat bersejarah bagi Indonesia karena pada tahun ini Indonesia melaksanakan pemilihan presiden baru. Semua masyarakat khususnya Indonesia menyambut itu semua dengan suka cita karena pada tahun ini mereka memiliki hak untuk memilih siapa presiden yang pantas berkuasa di tahun 2019. Pemilihan serentak pun dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan masyarakat indonesia menyikapi itu semua dengan serentak dan senang.

Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi dari penghitungan dan perolehan suara dari tingkat nasional di 34 provinsi dan 130 PPLN untuk Pemilihan Presiden 2019, di Jakarta, pada selasa 21-05-2019 dini hari. Hasilnya pasangan paslon 01 (Joko Widodo-Ma'ruf Amin) memperoleh hasil suara sebanyak 55,50% dan pasangan 02 (Prabowo-Sandiaga Uno) memperoleh hasil suara 44,50%. Menurut Arief Budiman selaku ketua KPU bahwa pihak KPU memberikan kesempatan untuk peserta pemilu yang kurang puas terhadap hasil penghitungan suara untuk mengajukan gugatan protes ke Mahkamah Konstitusi (MA) dalam jangka waktu selama 3 hari setelah hasil perolehan suara ditetapkan.[2]

Seiring menjelangnya hasil pengumuman pada 22 Mei tersebut, kubu 02 (Prabowo & Sandiaga) mengumumkan bahwa Pemilu 2019 curang dan melakukan mobilisasi kekuatan massa, yakni dengan wacana *People Power*. Semua dengan kompak mengawal Badan Pemenangan Nasional (BPN) dari Prabowo & Sandiaga Uno saat melapor dugaan adanya kecurangan dalam

[2] Arief Budiman, *"Kpu Tetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pilpres 2019"* (https://kominfo.go.id/content/detail/18852/kpu-tetapkan-rekapitulasi-perolehan-suara-nasional-pilpres-2019/0/berita, Diakses pada 28 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu 2019. Laporan dugaan kecurangan ke bawaslu atas perintah Prabowo, BPN melaporkan bahwa bawaslu menggunakan pengguna dari aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan petahana dalam pemilu pilpres 2019.

Sementara itu Ketua BPN dari Prabowo & Sandiaga Uno, Amien Rais sejak 1 April 2019 menyuarakan ancaman akan mendorong semua masyarakat untuk berdemo apabila kecurangan benar-benar terjadi dalam pemilu. Menurut Amien bahwa rencana aksi tersebut adalah bagian dari bentuk sosial masyarakat dalam pemberontakan kepada penguasa. "Apabila benar terjadi kecurangan, kami semua dengan serentak akan mendorong masyarakat pergi ke Monas untuk berdemonstrasi.[3]

Direktur Eksekutif Indonesia yakni Karyono Wibowo mengatakan bahwa ada hubungan antara tuduhan kecurangan pada Pemilu 2019 dengan wacana tentang people power atau pengerakan terhadap massa. kecurangan itu berakibat pada gerakan *people power* yang ingin membuat kerusuhan pada pemilu. Karyono menilai bahwa wacana *people power* di pihak 02 sebagai upaya untuk menolak hasil pemilu tersebut. Semua itu sangat mirip dengan pergerakan kelompok oposisi di berbagai negara yang mengalami seperti instabilitas politik.[4]

Menurut Karyono Wibowo Kecurangan itu bersifat terstruktur, sistematis dan massif istilah Kecurangan yang terstruktur itu apabila penyelenggara dan

---

[3] Ibid.,
[4] Yuliawati dan Fahmi Ramadhan, *"Gerakan People Power, Siasat Terakhir Prabowo Jelang 22 Mei"* (https://katadata.co.id/berita/2019/05/13/gerakan-people-power-siasat-terakhir-prabowo-jelang-22-mei, Diakses pada 28 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat yang ingin sengaja memenangkan salah satu calon. Sistematis lebih mengacu pada pelanggaran yang dilakukan secara matang dan teratur. Dan juga massif adalah suatu pelanggaran yang dilakukan secara fatal di dalam tempat pemungutan suara.[5]

Sedangkan pendapat dari pihak 02 yakni Eggi mengklarifikasi tentang seruan *people power*. Dia mengatakan tidak akan melakukan penggulingan atas pemerintahan yang memang sudah sah, hanya seruan untuk berdemonstrasi bersama.[6] Amien Rais selaku Mantan ketua MPR RI itu kembali hadir dengan pernyataan yang memicu kontrovesi di dalam pembicaraan masyarakat. Dalam pernyataannya di dalam Aksi 313, Amien Rais menyatakan dirinya siap mendorong gerakan *people power* jika kecurangan terjadi pada pemilu 2019. Dengan Pernyataan seperti itu lantas menimbulkan sebuah tanggapan dari beberapa tokoh politik Tanah Air. Terutama tanggapan dari nomer urut 01 sekaligus petahana presiden Jokowi misalnya, menanggapi tentang pernyataan Amien bahwasannya tidak perlu ada tekanan terhadap masyarakat dan pemerintahan penyelenggaraan pemilu 2019.[7]

Menurut Jokowi semua proses demokrasi yang berlangsung sebelum dan sesudah 17 April 2019 sudah konstitusional harusnya mekanisme konstitusional harus selalu di bertahankan karena ini sebuah pondasi demokrasi. Jokowi berpendapat bahwa kekalahan memang bak pil pahit, tapi bukan berarti, bila kalah malah berbuat hal yang di luar koridor hukum. Karenanya bila pihak yang

[5] Ibid.,
[6] Ibid.,
[7] H33, *"Amien Bertenaga Untuk People Power"* (https://pinterpolitik.com/amien-bertenaga-untuk-people-power/, Diakses pada 29 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalah merasa dicurangi, mereka dipersilahkan menempuh langkah konstitusional dengan mengadukan ke Mahkamah Konstitusi.[8]

Sebelum masuk lebih dalam alangkah baiknya kita mendeskripsikan apa pengertian dari *People Power* sendiri, *People Power* merupakan demonstrasi dalam upaya mengulingkan kuasa yang di miliki presiden secara paksa melewati aksi demonstrasi seluruh rakyat. Aksi tersebut dilakukan secara bersama-sama seluruh masyarakat turun ke jalan untuk berdemonstrasi supaya presiden turun jabatan karena telah bertindak otoriter dan melanggar sebuah konstitusi di dalam negara atau melakukan tindakan secara menyimpang. Secara garis besar *people power* memunyai makna kekuatan masyarakat. Mereka bersama-sama melakukan protes dalam bentuk demonstrasi kepada penguasa karena bertindak dzalim dan sewenang-wenangnya. Pasca pemilu di Indonesia 2019 Istilah ini mulai ramai di perbincangkan di kalangan masyarakat. Rakyat Indonesia ingin memberontak kepada penguasa. Mereka mengetahui bahwasannya memang terdapat permasalahan di balik sistem pemerintahan sekarang.[9]

Pandangan Amien Rais tentang *People Power* sendiri yakni *People Power* itu bukan untuk mengganti rezim atau menjatuhkan presiden akan tetapi gerakan *People Power* itu diatur dalam undang-undang selama tidak merugikan negara dan menimbulkan kehancuran. Beliau mengatakan *People Power* itu konstitusional, demokrasi dan dijamin oleh HAM. Amien mengatakan, gugatan

---

[8] Faizal Fanani, "*Jokowi Tanggapi People Power 22 Mei : Jangan Aneh-anehlah"* (https://m.merdeka.com/politik/jokowi-tanggapi-people-power-22-mei-jangan-aneh-anehlah.html, Diakses pada 29 Juni.

[9] "*Apa Itu People Power"* (https://m.wartaekonomi.co.id/berita225169/apa-itu-people-power.html, Diakses pada tanggal 30 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa pemilu diajukan karena BPN merasa ada kecurangan dalam pemilu 2019 yang bersifat terstruktur.[10]

Adapun tanggapan Badan Pemenang Nasional (BPN), Andre Rosiade tentang *people power* Amien Rais Menurutnya, *people power* yang dimaksud adalah bukan hal-hal yang melanggar melanggar konstitusi karena beliau menjelaskan *people power-nya* tersebut mengajak kepada masyarakat untuk melaksanakan demokrasi yang sehat dan terarah, serta demokrasi yang mencegah kecurangan juga bisa diantisipasi. Jadi maksud *people power* pak Amien yakni mengajak pendukung untuk bersama-sama mengawal demokrasi kita agar berjalan secara sehat dan konstitusional.[11]

Selain itu tanggapan dari Denny Siregar mengenai *people power*, menurutnya *people power* mudah untuk dikatakan, akan tetapi sesunggunya sangat sulit untuk melaksanakannya. di karenakan *people power* sangat harus memenuhi beberapa syarat agar bisa terlaksana dengan sangat baik. Syaratnya yakni Mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali mengatakan *people power* baru akan dapat terjadi jika krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat, selain itu juga krisis politik yang membuat pemerintahan tidak berjalan, gangguan keamanan yang massif dan juga aparat keamanan yang tidak terkendali.[12]

---

[10] *"Ini Pengertian "People Power" Versi Amien Rais Bukan Untuk Jatuhkan Presiden",* (https://kupang.tribunnews.com/2019/05/25ini-pengertian-people-power-versi-amien-rais-bukan-untuk-jatuhkan-presiden, Diakses pada 30 Juni 2019.

[11] Ilyas Listianto Mujib, *"Kontroversial, BPN Jelaskan Maksud People Power dari Amien Rais",* (https://www.idntimes.com/news/indonesia/ilyas-listianti-mujib-1/penjelasan-people-power-amien-rais, Diakses pada 30 Juni 2019.

[12]Denny Siregar *"Bisakah Prabowo Menggerakkan People Power",* (https://www.tagar.id/bisakah-prabowo-menggerakkkan-people-power, Diakses pada 30 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Prof Bagir Manan selaku mantan Ketua MA tentang *people power* itu harus mempunyai momentum. Karena tanpa suatu momentum, people power hanya berupa slogan tanpa suatu gerakan. Prabowo melakukan deklarasi kemenangan, termasuk dengan adanya pemasangan baliho ucapan selamat kepadanya, semua itu memang sengaja ingin membangun narasi kecurangan pada pemilu sehingga berujung pada people power itu. Semua itu tidak cukup karena people power tidak hanya digerakkan oleh salah satu pihak saja yang mengalami kekalahan di dalam pemilu. Rakyat tidak merasakan emosi mendalam terkait sebuah narasi *people power* itu. [13]

Menurut Denny Siregar memang benar ada gerakan untuk menggerakkan rakyat. Saya mendengar bahwa Mahasiswa di pengaruhi dan di ajak berdemo ke jalan, tapi mereka semua menolak. Begitu juga perwakilan buruh di pengaruhi untuk turun ke jalan akan tetapi mereka semua juga menolak dan tidak mau dipolitisasi. Yang memungkinkan untuk turun ke jalan hanyalah kelompok ormas pada gerakan 212. Kelompok 212 inilah yang bisa membangun gerakan tersebut. Jadi, semua jangan khawatir terhadap wacana *people power* dan deklarasi semua itu hanyalah seruan semata.[14]

Tanggapan Kapolri Tito Karnavian tentang *people power*, Tito menduga dengan berbicara tentang wacana *people power* yang memang berdasarkan seruan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ia mengingatkan agar

[13] Denny Siregar *"Bisakah Prabowo Menggerakkan People Power",* (https://www.tagar.id/bisakah-prabowo-menggerakkkan-people-power, Diakses pada 30 Juni 2019.
[14] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyampaian pendapat mengikuti aturan mekanisme yang memang sudah ditetapkan. [15]

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun bahwa *people power* hanya berupa penyampaian aspirasi saja dan bukan merupakan sesuatu yang makar. Undang-undang menjamin hak bagi masyarakat yang melakukan unjuk rasa asal tidak melanggar hukum. Menurut Tito Karnavian mengigatkan bila ada niat untuk menggulingkan pemerintah lewat gerakan *people power*, itu bisa dikatakan sebagai tindakan makar. Kalau memang sudah ada ajakan untuk aksi *people power*, itu mobilisasi umum sebagai penyampaian pendapat tetapi harus tetap melalui mekanisme, apalagi sudah ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah itu disebut makar dan ancaman pidana.[16] Menurut Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang memang terus mencermati dinamika politik tanah Air pasca pilpres 2019. Rizieq sendiri percaya adanya kecurangan dalam pilpres tahun ini. Ia menyerukan adanya gerakan *people power* yang digaungkan Amien Rais. Baginya *people power* adalah tindakan sesuai hukum atau konstutisional bukan inkonstitusional. [17]

Menurut Habib Rizieq bahwa *people power* merupakan gerakan konstitusional dan bukan merupakan makar, apabila ada yang mengatakan makar maka orang itu tidak paham dengan hukum. Rizieq Shihab mengatakan

---

[15] Tsarina Maharani *"Kapolri Bicara Soal 'People Power',Ingatkan Ada Ancaman Pidana",* (https://m.detik.com/news/berita/d-4539495/kapolri-bicara-soal-people-power-ingatkan-ada-ancaman-pidana, Diakses pada 30 Juni 2019.

[16]Ibid.,

[17] Albari Subhan, "*Ajakan 'People Power' Habib Rizieq Tidak Laku,* (https://www.obsessinnews.com/ajakan-people-power-habib-rizieq-tidak-laku, Diakses pada Tanggal 01 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Pilpres 2019 ada kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis. Ia mengingatkan agar kecurangan pada pemilu 2019 segera diatasi agar kemarahan masyarakat tak berubah menjadi *people power*. Akan tetapi ajakan Rizieq itu tidak begitu diterima oleh Prabowo karena Prabowo sendiri lebih menginginkan melakukan jalur Konstitusional terkait indikasi kecurangan dalam Pilpres 2019.[18]

Selanjutnya teori kuasa Foucault sangat berhubungan dengan aksi *people power* sendiri, sebelum masuk lebih dalam di sini akan dijelaskan apa teori kekuasaan Foucault. Menurut Foucault Kekuasaan tidak seperti kedaulatan yang ada di dalam negara atau sistem hukum yang menjadi dominasi di dalam negara tidak juga kekuasaan yang di miliki dalam setiap individu atau kelompok secara menyeluruh. Dengan hal tersebut maka kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi-relasi kekuatan yang terdapat dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi dimana relasi kekuatan adalah efeknya.[19]

Menurut Foucault kekuasaan tidak merupakan bentuk struktur atau bukan semacam lembaga, tidak juga daya kekuatan yang terdapat pada beberapa orang saja. Melainkan kekuasaan merupakan nama yang diberikan kepada masyarakat tertentu yang mengalami situasi strategis yang rumit.[20]

---

[18] Albari Subhan, "*Ajakan 'People Power' Habib Rizieq Tidak Laku,* (https://www.obsessinnews.com/ajakan-people-power-habib-rizieq-tidak-laku, Diakses pada Tanggal 01 Oktober 2019.

[19] Abdullah Khozin Af, "*Konsep Kekuasaan Michel Foucault"* . Teosofi : Jurnal Tasawuf dan pemikiran islam. Vol. 2 No. 1 Juni 2012, 140.

[20] Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu (Jakarta : PT Gramedia, 1997),115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan yakni sangat bertentangan karena tidak merupakan sebagai asas pemersatu atau asas yang terpencar dalam sumber tertentu, kekuasaan itu terpusat dalam struktur lembaga di dalam negara, Foucault mendefinisikan bahwasannya kekuasaan adalah bentuk strategis yang ada di dalam masyarakat, yang diciptakan dari kekuasaan yang terpencar dan menyeluruh.[21]

Kekuasaan merupakan bentuk strategi. Dan strategi itu terdapat di manapun dan apabila terdapat sistem, aturan, dan regulasi di sanalah kekuasaan bekerja. Kekuasaan tidak ada di luar melainkan di dalam karena dari dalam kekuasaan menentukan aturan, sistem dan juga hubungan yang memungkinkan semuanya terjadi.[22]

Bagi penulis itu adalah sekilas tentang deskripsi dari teori kuasa Foucault intinya judul yang penulis buat ini memuat tentang sebuah kasus yang belakangan ini sangat viral pasca pemilu pilpres 2019 yakni gerakan aksi ”People Power” yang sangat menyita masyarakat di Indonesia karena dari aksi ini massa akan berkumpul untuk tujuan satu yakni kedaulatan rakyat dan untuk menjatuhkan sistem pemerintahan sekarang.

Semua itu mucul karena adanya sifat kekuasaan yang dimiliki individu masing-masing seperti contoh kekuasaan yang dimiliki oleh semua kelompok politisi di indonesia dan juga semacam sebuah strategi yang dilakukan oleh pihak tertentu tentang wacana *people power* pasca pemilu 2019, masalah

[21] Ibid.,202.
[22] Abdullah Khozin Af, “*Konsep Kekuasaan Michel Foucault”* . Teosofi : Jurnal Tasawuf dan pemikiran islam. Vol. 2 No. 1 Juni 2012, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul dari pihak 01 dan 02 yang sama-sama mempunyai egois yang tinggi terhadap sebuah mandat yakni kekuasaan. Judul yang saya ambil ini yakni **Gerakan Aksi "People Power" Pasca Pilpres 2019 (Analisis teori Kuasa Michel Foucault).**

Mungkin sedikit di sini penulis ingin mencoba menghubungkan antara kasus gerakan aksi *people power* karena aksi tersebut merupakan sebuah strategi yang di buat oleh kelompok tertentu yang mempunyai kekuasaan tinggi pasca pemilu 2019 dengan wacana *people power* yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sudah dibentuk sekarang. Oleh karena itu dengan di hubungkan dalam teori kuasa Michel Foucault yang mana sebuah kelompok berhak memiliki strategi dan kekuasaan untuk menyatakan benar terhadap sebuah strategi yang dilakukan yakni gerakan aksi *people power* agar bisa menguasai sepenuhnya pemerintahan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Dari semua paparan yang ada di dalam latar belakang tersebut, peneliti atau penulis ingin bermaksud memahami dan meneliti sebuah judul yakni Gerakan aksi "People Power" pasca pilpres 2019 dengan analisis teori kuasa Micheal Foucault. maka dengan deskripsi tersebut akan muncul sebuah pertanyaan dan jawaban sebagai berikut :

1. Bagaimana munculnya gerakan aksi "people power" pasca pilpres 2019 ?
2. Bagaimana Teori Kuasa Michel Foucault dalam menganalisa gerakan aksi "people power" pasca pilpres 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian penulis seperti itu tentang objek dan permasalahan yang di angkat, maka timbulah sebuah tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang bagaimana munculnya gerakan aksi "people power" pasca pilpres 2019
2. Menjelaskan tentang Teori Kuasa Michel Foucault dalam menganalisis gerakan aksi "people power" pasca pilpres 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Di dalam penelitian ini di samping juga memiliki tujuan manfaat dan juga memiliki kegunaan. Kegunaan penelitian ini bertujuan untuk memberikan dampak manfaat terhadap berbagai kalangan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Yang didapat dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi semua masyarakat khususnya di Indonesia. Dan juga untuk bidang politik antara pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

01 dan 02 dalam menjalankan demokrasi, dan untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan, sikap dalam berdemokrasi yang baik agar tidak tercipta sebuah gerakan people power yang berujung permusuhah di dalam negara ini, dan agar tercipta suatu kemajuan dan baik khususnya di dalam negara Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan khusunya dibidang demokrasi tentang munculnya sebuah gerakan aksi "People Power" 2019 yang dapat memicu ke arah positif dan negatif di tahun modern masa kini khusunya di bidang politik di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Terbit	Temuan
1.	Putri Rezki Manan	Pengaruh *People Power* dalam suksesi kepemimpinan di Mesir	Skripsi Universitas Hasanuddin tahun 2017	Pengaruh people power menyebabkan kepemimpinan presiden Mursi turun tahta oleh kelompok rakyat yang melakukan gerakan people power.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah apabila penelitian di atas tentang sebuah gerakan people power yang menyebabkan turunnya Mursi yang dilakukan masyarakat pada waktu itu. Sedangkan penelitian saya lebih terfokus kepada gerakan people power yang digunakan untuk menolak hasil pilpres 2019 dan juga di Analisis langsung oleh teori kuasa Michel Foucault.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Clip Anggara S, Marjono, Kayan Swastika	American Intervention In The Overthrow Of President Ferdinand E. Marcos In Philippines in 1983-1986	Jurnal History Education Program, Jember University tahun 2017	Sikap intervensi Amerikat serikat dalam merubah tatanan politik baru dengan menjatuhkan presiden Marcos dalam gerakan *People Power*

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti saya adalah bahwasannya penelitian di atas lebih terfokus dalam menggunakan *people power* dengan tujuan merubah tatanan politik yang lebih baik lagi di dalam pemerintahan Marcos. Sedangkan penelitian saya lebih terfokus kepada gerakan people power yang digunakan untuk menolak hasil pilpres 2019 dan juga di Analisis langsung oleh tokoh Michel Foucault.

3.	Riyan Gunawan, Ahmadi	Fungsi Media Massa dalam Perspektif Negara Demokrasi terkait Penyelenggaraan Pemilu	Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang	Media Massa sangat berfungsi bagi masyarakat demi terwujudnya pemilu 2019 yang berkualitas dan demi melahirkan pemimpin yang berkualitas juga.

Penelitian di atas lebih terfokus pada kegunaan media massa dalam terwujudnya sebuah pemilu 2019 dan pemimpin yang berkualitas. Sedangkan peneliti saya lebih kepada gerakan people power yang terjadi pasca pilpres 2019 dalam analisis teori kuasa Michel Foucault.

4.	Dewi Shinta Lestari	Peran *People Power* Terhadap Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Desa Bejiharjo	Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017	Peranan People Power agar pengembangan Ekonomi Masyarakat meningkat di desa Bejiharjo.

Penelitian diatas lebih terfokus bahwasannya people power untuk pengembangan ekonomi masyarakat di desa Bejiharjo agar meningkat. Sedangkan penelitian saya lebih terfokus kepada gerakan people power yang digunakan untuk menolak hasil pilpres 2019 karena adanya kecurangan dan juga di Analisis langsung oleh tokoh Michel Foucault

5.	Cora Elly Noviati	Demokrasi dan Sistem Pemerintahan	Jurnal Universitas Moch. Sroedji Jember 2013	Kekuasaan tertinggi negara demokrasi berada di tangan rakyat sendiri, dikelolah rakyat dan untuk kepentingan rakyat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian diatas lebih terfokus bahwasannya kekuasaan tertinggi negara demokrasi berada di tangan rakyat dan dikelola untuk kepentingan rakyat sendiri. Di sini rakyat menjadi sangat penting dalam negara yang menganut demokrasi. Sedangkan penelitian saya dengan adanya people power merupakan suatu bentuk dari protes rakyat tertentu tentang adanya dugaan kecurangan dalam pilpres 2019 dan juga di Analisis oleh teori kuasa Michel Foucault tentang adanya gerakan tersebut.

6.	Umar Kamahi	Teori Kekuasaan Micheal Foucault : tantangan bagi sosiologi politik	Jurnal UNDAMA kupag tahun 2017	Arti teori kekuasaan Foucault dalam menghadirkan tantangan ilmu politik dan sosiologi politik.

Dalam penelitian jurnal di atas bahwasannya jurnal tersebut menjelaskan tentang sebuah teori kekuasaan Michel Foucault dalam menghadirkan sebuah tantangan dalam bidang politik. Sedangkan penelitian di dalam skripsi saya memang toerinya sama akan tetapi di penelitian saya menjelaskan bahwasannya teori kuasa Michel Foucault di pakai untuk menganalisis gerakan "poeple power" pasca pilpres 2019.

7.	Micheal Foucault terj S.H Rahayu	Seks dan Kekuasaan	PT Gramedia, jakarta tahun 1997.	Penjelasan tentang teori kuasa secara detail dari Micheal Foucault.

Buku ini merupakan salah satu buku primer Michel Foucault karena di dalam buku tersebut menjelaskan tentang sebuah teori kuasa secara detail khususnya dalam kerja sebuah teori tersebut. dan buku ini sangat penting dengan sebuah skripsi saya karena sama-sama tentang teori kuasa Foucault. akan tetapi di dalam penelitian saya bahwasannya teori kuasa di pakai untuk menganalisis tentang gerakan "people power" .

8.	Micheal Foucault	Arkeologi Pengetahuan	IRCISoD, Yogyakarta tahun 2012	Penjelasan tentang konsep dan strategi pemikiran Micheal Foucault.

Buku ini merupakan buku primer Michel Foucault karena di dalam buku ini menjelaskan tentang sebuah konsep dan strategi pemikiran Michel Foucault.

9.	Abdullah Khozin Af	Konsep Ke kuasaan Micheal Foucault	Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam UINSA tahun 2011	Penjelasan secara rinci asal mula lahirnya tentang konsep kekuasaan Foucault.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang sebuah teori kekuasaan Michel Foucault terutama dalam konsep dan sejarah lahirnya teori tersebut. dan jurnal tersebut memang ada kesamaan dengan skripsi saya. Karena sama-sama membahas tentang teori tersebut akan tetapi di dalam skripsi saya teori tersebut di pakai untuk menganalisis sebuah gerakan "people power" pasca pilpres 2019.

10.	Joko Priyono	Wacana, Kuasa dan Agama dalam kontestasi pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault	Jurnal Ilmu Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga 2017	Penjelasan secara rinci hubungan teori kuasa dengan konstetasi pigub Jakarta yang sempat ramai di berbagai media Indonesia.

Dalam penelitian jurnal di atas menjelaskan tentang sebuah relasi kuasa dan pengetahuan Michel Foucault yang dipakai untuk meninjau sebuah pilgub di Jakarta pada waktu itu. Sedangkan dalam penelitian saya ada perbedaan karena teori kuasa Foucault ini di pakai dalam menganalisis sebuah gerakan "people power" pasca pilpres 2019.

F. Kerangka Teori

Dalam artian umum, *peole power* mempunyai makna sebagai kekuatan masyarakat. Di mana penempatannya adalah sebagai perwujudan bentuk melawan segala ketidakadilan. Para masyarakat meyakini, ada segelintir *elite global* yang berusaha mencuci otak dan merampas hak-hak rakyat kecil yang notabene sangat awam dan tidak menyadari hal tersebut. sejatinya gerakan *people power* merupakan sebuah bentuk kesadaran dari masyarakat. Mereka berusaha melawan dan melakukan protes terhadap bentuk kesalahan yang dilakukan para penguasa. Caranya pun banyak mulai dari menyanggah fakta yang selama ini beredar di masyarakat, melawan arus ilmu pengetahuan, mengungkapkan bobroknya sistem keuangan yang ada dan banyak lainnya.

Filipina merupakan salah satu negara yang mencetuskan aksi *people power* ini. Gerakan tersebut digalang secara masif guna membendung sekaligus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melawan dominasi pemimpin mereka, Ferdinand Marcos. Ia digoyang oleh rakyatnya sendiri lantaran ketidakadilan dalam memerintah serta terindikasi melakukan korupsi serta pelanggaran HAM. Mirip dengan gerakan reformasi 1998 di Indonesia. Yang mana pada waktu itu Indonesia mengalami krisis moneter pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto. Itulah sebagian kecil dari bentuk *people power*. para masyarakat percaya ada hal buruk yang memang sengaja di sembunyikan rapat-rapat oleh penguasa. Mereka kerap melakukan propaganda terselubung dan memproklamirkan diri sebagai penyelamat rakyat.

Sedangkan gerakan *people power* 2019 muncul dari kelompok 02 yakni Prabowo dan Sandiaga Uno pasca sebelum dan sesudah pilpres 2019. Istilah *people power* menurut Amien Rais untuk memobilisasi massa yang agar mereka tau bahwa telah terjadi kecurangan di dalam pemilu 2019 yang secara terstruktur, sistematis dan massif. Akan tetapi di sini dari munculnya suatu permasalahan itu tidak bisa digolongkan menjadi gerakan *people power* karena memang *people power* adalah gerakan sosial yang dilakukan masyarakat dengan damai dan anti kekerasan sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan yang tidak baik. Akan tetapi di 2019 gerakan ini di lakukan untuk memprotes hasil KPU dan tidak mempercayai hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Jadi *people power* 22 Mei bertujuan untuk memobilisasi massa dalam bentuk narasi provokatif yang diserukan oleh sejumlah elite politik, agamawan, dan juga kalangan intelektual yang memang mendukung gerakat itu. Dan sasaran utamanya yakni masyarakat karena sejatinya gerakan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori kuasa Michel Foucault yakni Menurut Foucault kekuasaan tidak merupakan semacam struktur dan juga bukan pula semacam lembaga, tidak juga daya kekuatan yang hanya ada pada beberapa orang saja. Melainkan kekuasaan merupakan nama yang di dapat dari masyarakat tertentu yang mengalami situasi strategis yang rumit.

Makna lain dari teori kuasa Michel Foucault yakni bentuk kekuasaan yang beroperasi sebagai sistem pemerintahan dan juga perannya sebagai lembaga yang berkuasa. Lembaga yang tersebar secara merata di dalam masyarakat yang bertugas memobilisasi setiap manusia. Dan kekuasaan itu tidak hanya di kuasai oleh negara, yang dapat dicapai dengan mudah akan tetapi Kekuasaan itu terdapat di manapun karena kekuasaan adalah semacam dimensi dari sebuah relasi, dimana ada relasi di sana ada kekuasaan yang bekerja.

Penulis kira sangat tepat sekali dihubungkan dalam teori kuasa Foucault karena dengan adanya sifat kekuasaan seorang manusia memiliki wewenang yang tinggi dan bisa melakukan apa saja sesuai wewenangnya, seperti contoh pihak 02 memiliki kekuasaan di kelompok tertentu atas terciptanya gerakan aksi "People Power" 2019 yang dilakukan karena adanya dugaan kecurangan dalam pemilu sehingga menimbulkan protes terhadap KPU dan tidak percaya terhadap penghitungan KPU. Oleh karena itu munculah sebuah narasi provokatif yang di wacanakan sejumlah elite politik, agamawan, hingga kalangan intelektual dan yang menjadi fokusnya yakni agar masyarakat tertarik dengan gerakan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah istilah tentang cara pengumpulan data yang ingin dikumpulkan peneliti agar peneliti mendapatkan hasil yang objektif dan bisa dipertanggung jawabkan secara akademis, maka dari itu penelitian ini akan ditulisi dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Pendekatan

Pendekatan adalah cara memandang atau memahami suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai macam ilmu. Dan bagi penulis pendekatan yang cocok adalah pendekatan dalam bidang filsafat politik. Filsafat politik sendiri adalah suatu pendekatan ilmu politik yang relatif abstrak sebab berbicara pada dataran filosofis kegiatan politik. Pendidikan ini mengkaji mengapa suatu negara terbentuk, apa tujuan negara, siapa yang layak memerintah dan di mana posisi ideal sang penguasa dengan yang dikuasai, juga menyinggung tentang masalah moral politik. Dalam pendekatan filsafat politik dikenal empat tradisi besar yaitu tradisi klasik, pertengahan, penceraha dan radikal. Pendekatan filsafat politik menekankan pada ide-ide dasar seputar dari mana kekuasaan berasal, bagaimana kekuasaan dijalankan serta untuk apa kekuasaan diselenggarakan. Jadi kemungkinan besar pendekatan ini sangat cocok dengan apa yang penulis teliti karena mencakup sebuah hubungan antara lembaga pemerintahan dan penguasa negara yang menghasilkan sebuah konflik yakni *people power* 2019 yang memang dilakukan oleh para penguasa dari kelompok lain (selain aparat pemerintah atau negara).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Bagi peneliti Pendekatan lain dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis yakni jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder kemudian teknik pengolahan data, maka dari itu peneliti akan menyusun langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis ini adalah jenis penelitian kualitatif dan Teknik pengumpulan data penelitian ini tidak menggunakan riset lapangan ataupun wawancara tetapi di dasarkan pada riset pustaka (*Library Research)* yakni proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat dengan masalah penelitian dan menggunakan analisis pendekatan deskriptif yaitu bersifat literatur yang bertujuan untuk mendapatkan referensi dan data yang tertulis.[23]

2. Sumber Data

Dalam proses untuk pencarian data, penulis mengumpulkan macam-macam sumber data yang dapat diambil dari penelitian terdahulu untuk di cari titik pesamaanya. Baik yang sudah dipublikasikan atau yang masih belum dan contoh sumber data itu semacam website, artikel, jurnal, buku ataupun skripsi. Dan dalam penelitian tersebut maka penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer, sekunder dan lainnya.

a. Data Primer

Merupakan jenis data yang paling utama dalam hal meneliti dan menganalisis permasalahan, data primer ini merujuk pada buku-buku hasil karya

[23] Nanang Martono, *Metode penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali, 2014) 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asli FAUCOULT tentang teori kuasa dalam buku sex dan kekuasaan, dan buku lain yang memuat semua tentang teori tersebut. dan juga fakta-fakta di media yang memuat tentang masalah gerakan aksi "People Power" serta beberapa literatur permasalahan yang ada di dalam media seperti cnn indonesia, detik, wartakota, kata data, republika dan media lain-lain yang memuat tentang *people power*.

b. Data Sekunder

Data yang merupakan sebagai pendukung dari data primer data sekunder berupa tulisan-tulisan baik dalam bentuk buku maupun artikel yang mengandung pembahasan tentang teori Kuasa Faucoult dan penjelasan mengenai gerakan aksi "People Power" juga data tersier yaitu komentar maupun analisis terhadap teori Kuasa Faucoult yang ditulis oleh sarjana ataupun para cendikiawan. Data yang lain ialah seperti ensiklopedia, kamus, internet, koran, jurnal dan lain-lain.

3. Teknik Pengolahan Data

Metode deskripsi merupakan Langkah yang pertama dalam penelitian ini yaitu menggambarkan permasalahan tentang apa yang ingin penulis teliti sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti agar nanti mendapatkan dasar-dasar yang jelas dari penelitian tersebut. adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

Observasi Yaitu suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar.[24] Dan juga sebagai pengamatan dan pencatatan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang

[24] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendeketan Praktik*, (Yogyakarta : RINEKA CIPTA, 1992), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselidiki. Dalam arti yang luas observasinya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan secara langsung tetapi juga secara tidak langsung (melalui questioner).

Artinya mendapatkan fenomena-fenomena ini melalui sebuah berita tentang gerakan aksi "People Power" 2019 yang mengakibatkan keributan pasca pemilihan presiden di 2019.

Langkah kedua penulis dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana teori kuasa dari Micheal Foucault ini bekerja dalam menganalisis permasalahan yang penulis telah angkat.

Langkah ketiga adalah mengetahui dari makna yang terkandung tentang pernyataan terhadap pemikiran Micheal Foucault yang sangat berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat.

Langkah keempat adalah teknik analisis data ini menggunakan metode dekriptif yang artinya metode yang digunakan untuk menggambarkan / menganalisis suatu penelitian mengenai sebuah fakta-fakta tentang permasalahan sebuah gerakan "people power" pasca pilpres 2019 dengan sebuah teori Kuasa Michel Foucault.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang dimaksud oleh penulis disini adalah gambaran singkat substansi pembahasan secara garis besar, agar dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang keseluruhan isi skripsi ini dan guna lebih jelasnya alur yang akan disusun.

Bab pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan yang ingin dicapai, sumber-sumber yang digunakan, metode dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, biografi Michel Foucault Latar belakang pendidikan Foucault, karya-karya Foucault dan Teori Kuasa dari Michal Foucault sendiri.

Bab Ketiga, Dalam bab ini penulis menjabarkan pengertian gerakan aksi people power, penyebab gerakan people power, bagaimana terjadinya gerakan people power dan juga dampaknya seperti apa pasca gerakan people power tersebut.

Bab Keempat, berisi tentang bagaimana gerakan aksi “People Power” pasca pilpres 2019 dalam pandangan analisis teori kuasa Michel Foucault.

Bab Kelima, dimana dari bab-bab di atas sebelumnya yang berisikan kesimpulan dan saran agar mudah difahami peneliti selanjutnya. Adapun bagian akhir berisikan lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BIOGRAFI, KARYA DAN TEORI KUASA MICHEL FOUCAULT

A. Riwayat Hidup

Michel Foucault lahir pada tanggal 15 Oktober 1926, di kota kuno Poitiers Prancis dan diberi nama Paul-Michel Foucault. Ibunya Anne Malapert dan ayahnya, seorang ahli bedah yang makmur, Paul Foucault. dia memiliki kakak perempuan, Francine dan seorang adik laki-laki bernama Denys.. Ia berasal dari kalangan medis, ayahnya ahli bedah, seperti juga saudaranya dan kakeknya. Orangtuanya mengharapkan Michel akan memilih profesi yang sama, tetapi ia lebih tertarik pada studi filsafat, sejarah dan psikologi. Tahun 1942 Foucault mulai belajar formal tentang filsafat. Juni 1943 lulus sarjana muda, kemudian bersilang pendapat dengan ayahnya yang menginginkannya menjadi seorang dokter namun Foucault menolak dan berminat kuliah di ENS (*Ecole Normale* Superiure).[25]

Setelah itu kita bisa melihat bahwa memang pemikirannya berkaitan erat dengan bidang medis, khususnya psikopatologi. Ia diterima di *Ecole normale superieure* (1945) dan menempuh studinya terutama dibawah bimbingan G. Canguilhem, G. Dumezil dan J. Hyppolite. Tahun 1946 Foucault kembali mengikuti ujian ENS.[26]

Dia berhasil diterima dengan memperoleh peringkat keempat. Dua tahun kemudian ia memperoleh *licence* dalam filsafat (1948) dan sesudah dua tahun *licence* dalam psikologi (1950). Ia juga mendapat diploma dalam psikopatologi (1952). Pada tahun-tahun berikutnya ia melanjutkan penelitiannya di beberapa

[25] Listiyono Santoso, *Epistemologi Kiri*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2006), 185.
[26] Ibid., 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

klinik psikiatris dan mengajar di *Ecole normale superieure* tentang psikopatologi. Seperti banyak pemuda radikal lainnya, sesuai Perang Dunia II ia menjadi anggota Partai Komunis Prancis, sampai tahun 1951.[27]

Dalam tahun 60-an Foucault mengajar di universitas-universitas di Montpellier, Tunis (Afrika Utara), Clermond Ferrand, Paris-Nanterre. Ia juga menjadi salah seorang pendiri Universitas Paris-Vincennes (kemudian disebut Universitas Paris VIII), universitas eksperimental yang didirikan dalam rangka pembaruan pendidikan universiter sesudah kericuhan sekitar tahun 1968. Kemudian di bulan desember 1969 ia dipilih sebagai profesor di *College de France*. Tahun 1984 ia meninggal dunia pada umur 57 tahun. Walaupun tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, ada kepastian cukup besar bahwa ia menjadi korban penyakit AIDS.[28]

B. Karya-karya

Michel Foucault merupakan seorang tokoh yang sangat terkenal di prancis, ia adalah salah satu tokoh yang sangat produktif dalam membuat sebuah karya dengan menerbitkan beberapa buku yang cukup terkenal. Antara lain Sejarah Kegilaan, Arkeologi pengetahuan, Sejarah seksualitas dan juga teori tentang kuasa. Dan berikut adalah karya-karya yang di ciptakan oleh Michel Foucault.

- *Mental Ilnes and Psychology* (penyakit jiwa dan kepribadian) pada tahun 1954.
- *Folie et deraison. Histoire de la folie a l'age classique* (Kegilaan dan "Unreason". Sejarah Kegilaan dalam Zaman Klasik) pada tahun 1958.

[27] K. Bartens, *Filsafat Barat Kontemporer,* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 297.
[28] Ibid.,301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Histoire de la folie* (Sejarah Kegilaan), *Raymond Roussel* (Tentang seorang sastrawan prancis), *Naissance de la clinique. Une archelogie du regard medical* (Lahirnya Klinik. Sebuah Arkeologi tentang tatapan medis. Pada tahun 1963.
- *Les mots et les choses. Une archelogie des sciences humanies* (Kata-kata dan Benda-benda. Sebuah Arkeologi tentang Ilmu-ilmu Manusia). Pada tahun 1966.
- *L'archelogie du savoir* (Arkeologi Pengetahuan) pada tahun 1969.
- *L'ordre du discours* (Susunan Diskursus) pada tahun 1970.
- *Surveiller et punir. Naissance de la prison* (Menjaga dan menghukum. Lahirnya penjara) pada tahun 1975.
- *Historie de la sexualite* (Sejarah Seksualitas), *La volonthe de savoir* (Kemauan untuk Mengetahui) pada tahun 1976.
- *Power / knowladge* (Kekuatan dan Pengetahuan) pada tahun 1980.
- *L'usage des plaisirs* (Penggunaan Kenikmatan) pada tahun 1982.
- *Le souci de soi* (Keprihatinan untuk dirinya) pada tahun 1984.
- *The care of the self, vol 3 of the history of sexuality (Histoire de la sexualite, III : le souci de soi)* tahun 1986.[29]

Itu adalah sebuah karya yang di lahirkan oleh Michel Foucault semasa hidupnya. Dan dari karya tersebut menjadikan beliau salah satu pemikir yang konsisten dengan berbagai macam karya dan menjadikan beliau salah filsuf modern di prancis pada kalah itu.

[29] Listiyono Santoso, *Epistemologi Kiri*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2006), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori Kuasa Michel Foucault

1. Sejarah lahirnya teori kuasa Michel Foucault

Memahami Michel Foucault adalah memhami salah satu dari keunikan dari bermacam-macam filsafat modern yang paken. Rudi Visker dalam *Michel Foucault : Geneology as Critique* bahkan menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan filsuf yang lain, Foucault ini bukan pemikir yang banyak menulis tentang tema-tema kefilsafatan pada umumnya. Melainkan Foucault sekilas tampak berbeda dan unik ketika intensif membahas kegilaan, struktur *epitisme* klasik, rumah sakit, penjara, keburukan atau seksualitas.

Memahami kontroversi yang ditimbulkan oleh pribadi, pemikiran dan karya-karyanya, maka persoalan merumuskan ide Foucault ke dalam garis-garis besar pemikiran yang bakupun menjadi persoalan yang sukar. Sebagai contoh, di dalam menggambarkan satu ide Foucault tentang kekuasaan saja ada banyak versi dan sudut pandang dari berbagai macam kepentingan. Sebagian pemikir meletakkan ide kekuasaan Foucault bekerja sebagai pemerintahan dan peran-perannya, sebagai kelas sosial yang berkuasa, ada dua pendapat menurut Foucault yang memang sangat penting saat pengetahuan bertemu dengan rasional tentang kemanusiaan. *Pertama,* dengan pengetahuan individu bahwasannya manusia adalah makhluk terdapat dalam lingkungannya sendiri, *kedua* ilmu rasional/pikiran dan kebenaran ituakan terus menerus sepanjang sejarah akan berubah.[30]

Sekitar tahun 1968 menjadi awal kemunculan perkembangan baru dari teori Foucault tentang kuasa. Foucault mulai menaruh minat terhadap pemikiran

[30] Abdullah Khozin Af, "*Konsep Kekuasaan Micheal Foucault".* Teosofi : Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam. Vol. 2 No. 1 Juni 2012, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nietzsche (setelah sebelumnya sempat memberi kuliah tentang Nietszche) terutama yang berhubungan dengan geneologi (khususnya tentang kuasa). Bukan berarti pemikiran Foucault tentang kekuasaan tidak terdapat sebelumnya, tapi lebih tepatnya sudah terdapat dalam arkeologi meskipun hanya secara implisit. Secara umum di asumsikan bahwa analisis Foucault tentang kekuasaan adalah sebagai bentuk dari geneologi Nietszche.[31]

Foucault adalah seorang yang skeptis terhadap segala macam kebenaran. Baginya segala macam klaim kebenaran adalah interpretasi atas sebuah dunia yang sebenarnya tidak ada sebagai sesuatu yang historis. Untuk itu ia menyelidiki cara berpikir dan sejarah peradaban. Hampir dari semua uraian tentang kuasa, Foucault memang sering menggunakan gagasan orang lain sebagai bentuk reverensi bagi dirinya, akan tetapi selalu diolah dengan baik dan dimasukkan kedalam konsepnya sendiri. Oleh karena itu kita dapat melihat konsep Niesztche dalam tulisannya.[32]

Konsep Niesztche tentang kekuasaan dijadikan Foucault sebagai cermin refleksi dari filosofinya. Filsafat politik tradisional memang sangat beroprasi dalam bidang legitimasi. Kekuasaan merupakan sesuatu yang dibuat secara tertutup oleh negara yang dengan tujuan agar semua orang mematuhi perintah dari negara tersebut. Menurut Foucault kekuasaan itu bukan hanya negara saja yang menguasai akan tetapi Kekuasaan itu terdapat dimana-mana karena kekuasaan adalah satu relasi dan dimensi. Dimana ada relasi di sana ada kekuasaan yang bekerja.

Wacana pengetahuan dalam praktiknya Michel Foucault memang seringkali digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan merupakan sebuah

[31] Listiyono Santoso, *Epistemologi Kiri*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2006), 167.
[32] Abdullah Khozin Af, "*Konsep Kekuasaan Micheal Foucault".* Teosofi : Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam. Vol. 2 No. 1 Juni 2012, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaringan kelembagaan yang mendominasi dan berhubungan dengan relasi-relasi lain seperti produksi dan kekeluargaan, yang memang memainkan peran pengondisian dan dikondisikan.[33]

Kuasa itu ada dimana-mana dan Kekuasaan hanyalah sebuah strategi, strategi ini berlangsung dimana-mana dan disana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan itu tidak datang dari luar melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.[34]

Untuk selanjutnya "kuasa" menjadi tema terpenting bagi pemikiran Foucault. ia melihat bahwa istilah "arkeologi" tidak lagi digunakan olehnya. Banyak sudah ditulis tentang pemikiran kuasa oleh Foucault akan tetapi ada sedikit saja yang kita ketahui tentang itu. Ada misalnya analisa Marxistis. Implisit atau eksplisit Foucault sering menyebut marxisme, menurutnya analisa marxisme tentang kuasa karena pelbagai masalah yang tidak memuaskan.[35]

Konsep kekuasaan Foucault memang banyak perbedaan dari konsep-konsep dalam pendangan Marxian dan Weberian. Kekuasaan menurut Foucault bukan sebagai apa yang ada dan yang terdapat dalam kelompok kecil di masyarakat yang bisa terancam musnah. Kekuasaan juga tidak beroprasi secara menyimpang seperti dengan tindak kekerasan dan menekan yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan, termasuk lembaga negara. Kekuasaan juga tidak seperti siapa yang mendominasi di dalam atas kekuasaan itu seperti ekonomi atau ideologi (Marx), dan juga bukan dimiliki berkat kharisma yang ada di dalam diri manusia seperti kata Weber.

---

[33] Michel Foucault, *Power/Knowladge:Wacana Kuasa/Pengetahuan,* (Yogyakarta:Bintang Budaya, 2002), 175.
[34] Abdullah Khozin Af, "*Konsep Kekuasaan Micheal Foucault".* Teosofi : Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam. Vol. 2 No. 1 Juni 2012, 140.
[35] K. Bartens, *Filsafat Barat Kontemporer,* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan itu tidak dilihat dan difahami secara negatif, melainkan dilfahami secara positif dan produktif.[36]

Objek kekuasaan Michel Foucault sendiri dalam penelitan ini adalah kondisi atas dasar tentang penyebab lahirnya satu diskursus. Menurut Foucault bahwasannya ilmu pengetahuan dan juga kekuasaan itu memiliki hubungan. Diskursus ilmu pengetahuan yang ingin menemukan sebuah kebenaran dan kepalsuan yang memang di dasari oleh sebuah kekuasaan.

Ilmu pngetahuan digunakan untuk menentukan kebenaran dan menghilangkan kepalsuan. Di sini sangat jelas sekali bahwasannya kehendak untuk kebenaran adalah pengungkapan kehendak dalam berkuasa.[37]

Akan tetapi selalu terjadi korelasi yaitu pengetahuan mengandung kuasa seperti juga dengan kuasa yang mengandung pnegetahuan. Selain itu ilmu pengetahuan yang terwujud dalam teknologi memang sangat gampang memaksakan suatu terhadap masyarakat. Karena dalam zaman teknologi tinggi pun sebenarnya tetap ada pemaksaan, maka kita tidak dapat berbicara tentang kemajuan peradaban. Yang terjadi hanyalah pergeseran instrumen yang dipakai untuk memaksa sebuah kehendak.[38]

Kekuasaan bukan merupakan struktur dan apa yang menjadi miliknya akan tetapi kekuasaan digunakan dalam situasi strategis yang ada dalam masyarakat tersbut. Menurut Foucault kekuasaan itu dipahami sebagai bentuk relasi yang ada

---

[36]Umar Kamahi, "*Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik"* : Jurnal Al-Khitabah, Vol. III, No. 1, Juni 2017, 118.
[37] Abdullah Khozin Af, "*Konsep Kekuasaan Micheal Foucault".* Teosofi : Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam. Vol. 2 No. 1 Juni 2012, 141.
[38] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menyebar di dalam seluruh masyaratat yang mempunyai ruang lingkup strategis.

Kekuasaan itu difahami bukan seperti semacam apa kekuasaan itu, siapa yang memilikinya dan hadir dan bersumber dari mana, melainkan memahami kekuasaan mesti dipahami dengan pernyataan bagaimana kekuasaan itu bekerja dan beroprasi atau bagaimana kekuasaan itu dioperasikan.[39] *pertama*, kekuasaan merupakan suatu yang dimiliki oleh setiap orang dan setiap kelompok dalam mengatur fungsi dari kekuasaan yang nyata dalam masyarakat modern. Tetapi dalam pandangan Foucault konsep kekuasaan iti tidak bisa mengontrol secara menyeluruh terhadap relasi kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Karena konsep kekuasaan adalah *disiplinary power*.[40]

Disiplnary power bukan merupakan konsep tentang kekuasaan yang terdapat dalam otoritas yang mengontrol semuanya seperti ekonomi,keluarga, relasi sosial dan seksualitas. *Disiplinary power* hanya dapat beroperasi terhadap individu dalam mengedepankan normalisasi/strategi kekuasaan itu sebagai bentuk pembiasaan individu dalam bertindak serta berprilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan (*vehicle of power*).[41]

2. Definisi dan Strategi Teori Kuasa

Menurut Foucault kekuasaan itu tidak dapat dipahami dalam hal kepemilikan oleh sebuah institusi kelompok / negara sebagai semacam mekanisme yang membuat ketundukan warga terhadap negara. Dan kekuasaan itu tidak seperti

[39] Umar Kamahi, "*Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik"* : Jurnal Al-Khitabah, Vol. III, No. 1, Juni 2017, 119.
[40] Ibid.,119.
[41] Ibid.,119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk kedaulatan negara atau hukum yang begitu mendominasi atau juga penguasaan yang komplek kepada setiap individu dan kelompok. Dengan begitu kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan dimana kekuasaan itu beroperasi. Oleh sebab itu kekuasaan merupakan bentuk strategi dimana relasi-relasi adalah kekuatan dari kekuasaan tersebut.[42]

Ilmu sejarah yang selalu di pelajari juga sering berbicara tentang kuasa akan tetapi kuasa yang dimaksud lebih kepada penguasa seperti raja-raja dan panglima-panglima atau tentang lembaga-lembaga yang memiliki kuasa seperti negara, perlemen, gereja. Akan tetapi yang sampai sekarang tidak begitu dipelajari yakni tentang mekanisme-mekanisme kuasa atau strategi kuasa. Dan tema itulah yang menjadi fokus dari perhatian Michel Faucault tentang teori kuasa.[43]

Dalam filsafat yunani kuno, kaum sofis sudah mempelajari strategi kuasa, khusunya kuasa bahasa. Machiavelli adalah nama lain yang tidak boleh dilupakan. Tetapi filsuf yang paling penting dan dalam hal ini menjadi sumber inspirasi utama Foucault adalah Nietszche. Foucault ingin menganalisa strategi kuasa yang faktual. Ia tidak menyajikan suatu metafisika tentang kuasa, tetapi suatu mikrofisika, katanya. Artinya, masalahnya bukannya apakah itu kuasa, melainkan bagaimana berfungsinya kuasa pada suatu bidang yang tertentu. Kuasa bagi Foucault sama dengan serba banyak relasi kuasa yang bekerja di salah satu tempat atau waktu. Buku-buku *Menjaga dan Menghukum* dan *Sejarah Seksualitas* terutama bermaksud menganalisa strategi kuasa yang berbelit-belit itu di suatu bidang yang kongkret.[44]

---

[42] Umar Kamahi, "*Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik"* : Jurnal Al-Khitabah, Vol. III, No. 1, Juni 2017, 120.
[43]K. Bartens, *Filsafat Barat Kontemporer,* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 319.
[44] Ibid., 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini menurut Foucault kekuasaan memang harus dipahami, pertama sebagai macam-macam hubungan kekuatan yang imanen, kedua strategi dan perjuangan yang dalam pertarungan tanpa henti untuk memperkuat dan mengaturnya, ketiga hubungan semacam kekuatan yang sama-sama membentuk sebagai aturan, rangkaian dan sistem, rancangan umumnya lembaga pemerintahan yang terwujud dalam sistem negara, perumusan hukum dan hegemoni sosial.[45]

Karena dari hubungan kekuatan berbeda-beda yang dapat terus menerus menghasilkan berbagai bentuk kekuasaan, yang memang bersifat lokal dan tidak stabil. Karena memang kekuasaan itu ada di mana-mana bukan berarti mengikat semuanya, akan tetapi datang dari mana-mana dari setiap relasi-relasi yang ada dan kekuasaan itu menyebar luas di kalangan masyarakat lokal.

Kekuasaan adalah serangkaian mobilitas yang bertopang. Kekuasaan bukan sebuah lembaga saja dan juga bukan sebuah struktur. Kekuasaan adalah nama yang diberikan kepada suatu situasi strategis yang rumit terhadap masyarakat tertentu. Maka dari itu kita dapat mengemukakan beberapa proposisi kekuasaan antara lain :

- Bahwasannya kekuasaan itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh, dan diberikan secara begitu saja, kekuasaan berfungsi berdasarkan unsur yang tak terhitung dan tak terbaca kekuasaan diperoleh karena adanya unsur yang tak terhitung dan juga banyak.
- Bahwa hubungan kekuasaan memang tidak berada pada posisi di luar tipe dan macam hubungan yang lain sebagai proses ekonomis dan hubungan seksual), tetapi hubungan itu sangat imanen karena merupakan suatu dampak langsung

[45]Micheal Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu (Jakarta : PT Gramedia, 1997),114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pembagian ketaksederajatan dan ketimpangan yang dihasilkan di dalamnya.[46]

- Bahwa kekuasaan memang datang dari bawah artinya tidak terdapat dalam asas hubungan kekuasaan, karena memang penguasa dan yang dikuasai itu berlangsung dari yang tertinggi sampai terendah pada kelompok yang semakin lama memang semakin berkurang dan terbatas sampai kepada bagian yang paling dalam dari masyarakat tersebut.
- Bahwa hubungan kekuasaan itu memang bersifat tidak subjektif. Meskipun dengan mudah hubungan itu dipahami bukan berarti karena hubungan dari dampak suatu instansi/kelompok pada yang lain, karena memang di dalam bagian itu dipengaruhi oleh suatu strategi perhitungan, yakni tidak ada kekuasaan yang beroperasi tanpa adanya suatu sasaran dan tujuan.[47]

Akan tetapi semua itu tidak berarti bahwasannya kekuasaan itu hasil dari sebuah pilihan atau hanya keputusan seorang individu atau kelompok yang mengendalikan lembaga negara, atau yang mempunyai ekonomi yang tinggi dan mengelola seluruh jaringan kekuasaan yang berfungsi dalam suatu masyarakat itulah yang dapat mengambil keputusan. Rasionalitas kekuasaan adalah semacam taktik rasional yang sangat penting terhadap tingkat penerapan yang memang kekuasaan pada tatanan lokal ini saling berkaitan satu sama lain.[48]

[46] Micheal Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu (Jakarta : PT Gramedia, 1997),116.
[47] Ibid., 117.
[48] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa di manapun kekuasaan ada, di situ terdapat perlawanan karena sifat melawan memang akan selalu ada di dalam sistem kekuasaan. Memang harus diakui bahwa kita memang harus berada di dalam sistem kekuasaan, karena memang tidak akan pernah ada secara mutlak diluar kekuasaan karena kita di atur dan ditundukkan oleh hukum. Karena kekuasaan konon memang muslihat sejarah yang selalu menang di dalam hubungan relasional kekuasaan. Masalah hubungan itu pasti ada apabila kita berniat untuk melawan dan perlawanan itu hadir di mana-mana dalam jaringan kekuasaan.[49]

  Jadi tidak mungkin hanya terdapat ada satu titik saja penolakan besar terhadap kekuasaan. Karena memang pada dasarnya perlawanan-perlawanan itu hanya mungkin hadir dalam wilayah strategis antara hubungan kekuasaan. Perlawanan-perlawanan itu merupakan bentuk lain dari hubungan-hubungan kekuasaan terpateri di dalamnya dan tak tergoyahkan sebagai pelengkap dialektikanya. Jadi, perlawanan-perlawanan itu juga dilakukan secara tidak merata sebagaimana kekuasaan yang memang bersifat produktif dan menyebar luas dengan tujuan menjadi satu dalam sebuah perlawanan.[50]

  Namun pada kenyataannya kita memang dihadapkan dengan perlawanan yang bergerak dan selalu berubah, yang dapat timbul suatu perpecahan dalam masyarakat. Sebagaimana hubungan kekuasaan itu yang akan membentuk jaringan di segala individu atau kelompok, kemungkinan besar itulah bentuk strategis dari titik-titik perlawanan, yang membuat suatu perubahan itu benar-benar nyata dapat terjadi.

---

[49] Micheal Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu (Jakarta : PT Gramedia, 1997),118.
[50] Ibid.,119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam setiap wilayah hubungan yang terdapat kekuatan itulah memang harus mencoba menganalisis mekanisme kekuasaan. Memang benar pendapat Machiavelli bahwa dari beberapa orang hanya ada satu yang tidak berpikir tentang kekuasaan yang memang pada umumnya dimiliki oleh seorang raja dalam hal kekuatan, mungkin kita memang harus melangkah lebih jauh dan mengabaikan seorang raja dan terfokus terhadap mekanisme kekuasaan yang berdasarkan strategi imanen di dalam hubungan kekuatan tersebut.[51]

Suatu analisa menyeluruh rupanya bagi Foucault tidak mungkin. Tetapi mikrofisika seperti itu dapat menghasilkan beberapa pendapat umum tentang kuasa yang agak berbeda dengan kebanyakan pendapat sebelumnya tentang tema yang sama. Marilah kita memandang beberapa di antara pendapat-pendapat Foucault itu dengan sepatah komentar. Berikut adalah penjelasan dari Michel Foucault mengenai strategi kuasa.

3. Tabel tentang teori kuasa Michel Foucault

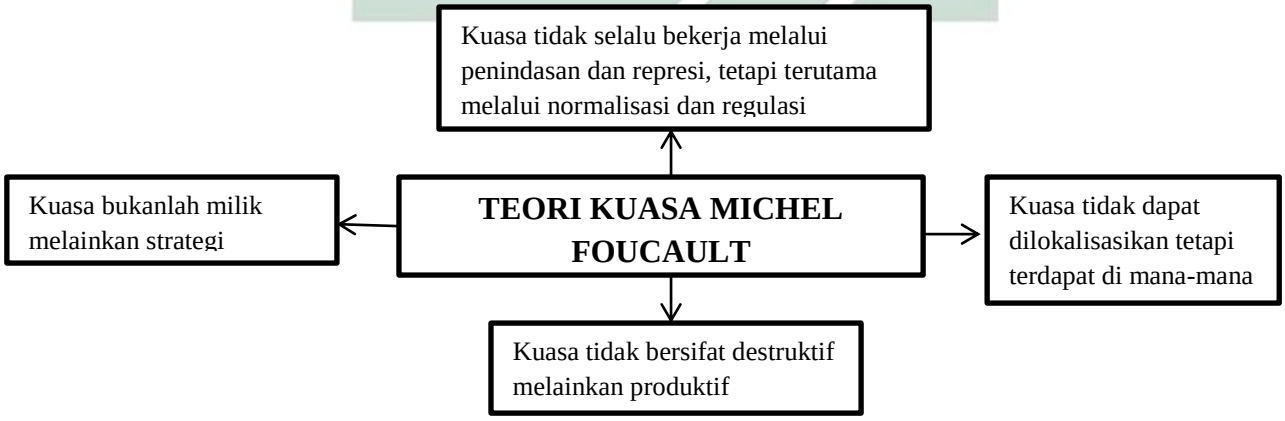

[51]Micheal Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu (Jakarta : PT Gramedia, 1997),120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kuasa bukanlah milik melainkan strategi

Biasanya kuasa disamakan dengan milik. Kuasa dianggap sebagai sesuatu yang dapat diperoleh, disimpan, dibagi, ditambah atau dikurangi. Tetapi dalam pandangan Foucault kuasa tidak dimiliki tetapi dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran.

b. Kuasa tidak dapat dilokalisasikan tetapi terdapat di mana-mana

Biasanya kuasa dikaitkan dengan orang atau lembaga tertentu, khususnya aparat negara. Tetapi menurut Foucault strategi kuasa berlangsung di mana-mana. Di mana saja terdapat susunan aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain dan dengan dunia, di situ pun kuasa sedang berkerja. Kuasa tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan dan hubungan-hubungan itu dari dalam malah memungkinkan semua itu. Secara khusus perlu kita perhatikan perbedaan antara kuasa dan pengetahuan. Pengetahuan tidak berasal dari salah satu subyek itu tetapi berasal dari relasi-relasi kuasa yang menandai subyek itu. Pengetahuan tidak "mencerminkan" relasi-relasi kuasa (seperti dikatakan Marxisme) pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi-relasi akan tetapi pengetahuan berada di dalam ruang lingkup relasi kuasa itu sendiri.[52]

Kuasa memproduksi sebuah pengetahuan karena memang pengetahuan berguna bagi kuasa. Tetapi menurut Foucault dijelaskan sesuatu yang secara lebih umum,

[52] K. Bartens, *Filsafat Barat Kontemporer,* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasannya tidak ada pengetahuan tanpa kuasa begitu juga tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Disini terdapat suatu hubungan antara pengetahuan yang memang mengandung kuasa seperti juga kuasa yang mengandung pengetahuan. Kuasa dan pengetahuan merupakan dua sisi yang menyangkut proses sama. Tidak mungkin pengetahuan itu netral atau murni. Tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat menciptakan dasar kemungkinannya sendiri, suatu ilmu dimungkinkan oleh transformasi-transformasi di antara relasi-relasi kuasa.

c. Kuasa tidak selalu berkerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi

Di sini lebih umum kuasa sering kali dianggap subyek yang berkuasa (raja, pemerintah, ayah, laki-laki dan kehendak umum) dan subyek itu dianggap melarang, membatasi, menindas dan sebagainya. Menurut Foucault kuasa tidak bersifat subyektif, inilah salah satu alasan juga mengapa ia menolak pandangan marxistis. Kuasa tidak dapat dilihat seperti contoh si A menguasai B dan kemudian (beberapa syarat terpenuhi) si B menguasai si A. Kuasa itu tidak bekerja dengan cara negatif dan represif, melainkan dengan cara positif dan produktif. Kata Foucault : kita harus berhenti meluikiskan akibat-akibat kuasa secara negatif seolah-olah kuasa meniadakan, merepresi, mensensor, mengabstraksikan, menyelubungi dan menyembunyikan.[53]

Pada kenyataannya semua itu salah karena kuasa itu memproduksi. Kuasa memproduksi realitas, memproduksi ruang lingkup obyek dan ritus-ritus kebenaran.

[53] K. Bartens, *Filsafat Barat Kontemporer,* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi kuasa tidak bekerja melalui jalan penindasan, melainkan melalui normalisasi dan regulasi apa yang dinamakan dalam menjaga dan menghukum sebagai disiplin. Suatu wilayah lain yang penting di mana normalisasi memegang peranan penting yakni pekerjaan. Pekerjaaan memungkinkan seorang manusia menjadi tenaga yang produktif. Itu berarti bahwa pekerjaan merupakan suatu cara untuk melatih dan menanamkan disiplin. Semua itu adalah salah satu stategi kuasa dan juga sistem-sistem filsafat yang memandang realitas sebagai kehadiran bagi suatu subyek transendental dapat ditempatkan dalam kerangka yang sama. Semua fenomena seperti itu mewujudkan suatu strategi kuasa yang tertentu.

d. Kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif

Kuasa tidak mungkin menghancurkan melainkan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak sedikit pendapat bahwa kuasa itu bersifat sesuatu yang jahat dan harus ditolak. Tetapi dengan menolak kuasa merupakan bentuk dari strategi kuasa itu sendiri. Karena tidak mungkin memilih tempat di luar kekuasaan strategi itu. Kuasa itu produktif, kuasa memungkinkan segala sesuatu.[54]

Tetapi mendekati kuasa dengan cara positif itu tidak sama dengan mendewa-dewakan masyarakat faktual dan tatanan politik yang ada. Sebaliknya, hanya analisa yang berpangkal pada kuasa sebagai kekuatan yang positif dan produktif dapat mengubah sesuatu dalam tatanan sosio-politik yang faktual. Mempersalahkan kuasa biasanya dibarengi dengan penolakan untuk menghadapi keadaan yang nyata

[54] Ibid.,324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memperbuat sesuatu dengannya. Yang terakhir ini adalah kritik Foucault atas kelompok-kelompok ultra-kiri yang menganut anarkisme.

Salah satu keberatan yang dikemukakan pada Foucault ialah bahwa dengan paham kuasa ia mengintroduksikan suatu faktor transendental baru dalam filsafat. Tetapi Foucaul membantah itu semua dengan tegas. Bahwa refleksi kuasa ini dikembangkan olehnya untuk semacam alat yang memungkinkan analisa tentang kuasa dan barangkali juga mengizinkan untuk mengambil bagian secara efektif dalam strategi kuasa. Bagi Foucault kuasa tidak merupakan faktor ontologis, melainkan sesuatu yang taktis belaka.[55]

Namun demikian mempelajari teori kekuasaan Foucault bukan hal yang remeh dan sia-saia. Terutama misalnya di dalam bidang politik dan pemerintahan, teori kekuasaan Michel Foucault adalah satu dari sekian teori yang sangat cerdas meneliti sejarah bagaimana warga negara patuh dan taat kepada konstitusi dan hukum

[55] Ibid., 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DINAMIKA AKSI "PEOPLE POWER" PASCA PILPRES 2019

A. Lahirnya Demokrasi di Indonesia

Gagasan demokrasi pada mulanya juga lahir melalui penghadapan cita-cita dengan realitas secara demikian. Ia tidak lahir serta hadir sebagai kata dalam arti harfiah, tetapi lebih merupakan struktur makna dari suatu prilaku atau perbuatan. Gagasan demokrasi bertolak dari kesadaran akan perlunya masyarakat yang "wajar" bagi kehidupan. Karena itu dalam periode awal pergerakan, perilaku demokratis dalam arti tindakan yang didasari oleh keinginan mengangkat harkat dan martabat manusia ke tempat yang lebih "wajar" itu, lebih muncul ke permukaan dari penggunaan istilah demokrasi itu sendiri. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila sikap demokratis dan usaha-usaha mengembangkan ide demokrasi tidak mulai dari kata-kata, apalagi slogan tetapi dalam bingkai makna sebuah tindakan yang bertolak dari kesadaran atas situasi diri. Dan semua itu tumbuh dari keprihatinan yang mendalam terhadap nasib bangsa sendiri yang tertindas.[56]

Ketika suatu negara contohnya Indonesia telah bersepakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memang berlandaskan falsafah demokrasi dapat dimaknai bahwa demokrasi menjadi pijakan utama di negara dalam memberikan kekuasaan secara mutlak kepada rakyat.

[56] HARIS, Syamsudin, *Demokrasi di Indonesia : gagasan dan pengalaman,* (Jakarta : penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan preferensi hidup untuk dapat berpatisipasi dalam memajukan bangsanya sendiri. Demokrasi merupakan kedaulatan rakyat yang selama ini menjadi prinsip yang selalu dijunjung tinggi ketika bangsa ini mufakat untuk hidup demokrasi. Gagasan demokrasi sudah ada sejak zaman sebelum reformasi dan demokrasi sendiri muncul dengan berbagai pertimbangan yang banyak sejak dahulu.

Program demokrasi yang diprakarsai pemerintah dapat meninggalkan kesan bahwa partisipasi rakyat adalah baik sehingga tidak perlu dipertanyakan, apakah hal itu seperti yang dibunyikan oleh teori-teori demokrasi. Akan tetapi persoalannya adalah seberapa banyak partisipasi yang otonom bagi demokrasi, artinya, rakyat berpartisipasi itu atas kesadarannya sendiri. Tidak ada tekanan dan paksaan dari mana pun. Inisiatif demokrasi yang bercorak dari atas ke bawah (*top-down*) bertujuan untuk mengontrol partisipasi daripada meningkatkan partisipasi itu. Salah satu tradisi dalam teori demokrasi banyak memberikan perhatian pada partisipasi terutama sebagai sumber legitimasi elit bagi yang memerintah. Sejauh warga negara berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, melalui pemungutan suara dan apapun ada cara lain, mereka memberikan persetujuannya untuk keputusan politik itu dan melegitimasi keputusan-keputusan dari rezim yang membuat keputusan politik tersebut. [57]

[57] Siti Aminah, *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta : KENCANA, 2014), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, upaya *top-down* untuk meningkatkan partisipasi harus ditafsirkan sebagai strategi dalam perjuangan untuk memperoleh dukugan rakyat dalam sistem politik. Yang mengacu pendapat bahwa demokrasi memerlukan peraturan ketat dari peluang untuk keterlibatan populer. Tradisi demokrasi elitis didasarkan pada proses politik. Sebaliknya, elit politik membuat keputusan atas nama rakyat. Peran rakyat adalah untuk memilih kepemimpinan mereka sendiri. Dalam hal ini, demokrasi adalah soal mengatur partisipasi bukannya membuka partisipasi itu.[58]

Menurut Penulis tahun 2019 adalah tahun yang sangat bersejarah bagi Indonesia karena pada tahun ini adalah tahun demokrasi yang mana di Indonesia melaksanakan pemilihan presiden baru. Semua masyarakat khususnya Indonesia menyambut itu semua dengan suka cita karena pada tahun ini mereka memiliki hak untuk memilih siapa presiden yang pantas berkuasa di tahun 2019. Pemilihan serentak pun dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Akan tetapi di tahun ini pun permasalahan muncul sedikit banyak dan sempat menjadi berita yang hangat di seluruh Indonesia yakni munculnya suatu gerakan aksi *people power* pasca pilpres 2019. Dan gerakan ini muncul di salah satu calon presiden yakni nomer 02 pasangan (Prabowo Subianto dan Sandiaga uno) kelompok itu merasah bahwa pemilu pada 2019 tidak netral dan merasah ada yang dicurangi maka dari itu salah satu pasangan ada yang merasah dirugikan.

[58] Siti Aminah, *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta : KENCANA, 2014), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan gerakan *people power* ini juga diperkuat oleh salah satu mantan ketua MPR RI yakni Amien Rais dengan mengubah gerakan people power menjadi gerakan kedaulatan rakyat. Dengan tujuan menolak hasil pemilu karena dianggap curang dan tidak netral. Kedaulatan rakyat sendiri adalah erat hubungannya dengan asas permusyawaratan perwakilan, sebab asas kedaulatan rakyat akan dilaksanakan dengan melalui asas permusyawaratan perwakilan atau sebaliknya. Sedangkan asas permusyawaratan perwakilan dinyatakan dari kalimat yang kedua yaitu dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah merupakan penjelmaan dari pada rakyat dan akan memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya.[59]

B. Sejarah People Power di Indonesia

Sebelum masuk lebih dalam kita deskripsikan pengertian dari *people power*. *People Power* sendiri merupakan penggulingan secara paksa atas kekuasaan presiden melewati geraksi semacam demonstrasi seluruh rakyat. Gerakan ini dilakukan dengan cara semua rakyat turun ke jalan untuk berdemonstrasi agar presiden turun jabatan karena diketahui telah bertindak otoriter dan melanggar sebuah konstitusi dan melakukan penyimpangan. Secara garis besar *people power* mempunyai makna yakni kekuatan oleh seluruh rakyat. Mereka bersama-sama melakukan perlawanan dan bentuk protes kepada penguasa karena bertindak dzalim dan sewenang-wenangnya.[60]

---

[59] Joenitro, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara,* (Jakarta : Penerbit PT RINEKA CIPTA, 1990, 9.

[60] *"Apa Itu People Power"* (https://m.wartaekonomi.co.id/berita225169/apa-itu-people-power-html, diakses pada tanggal 26 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasca pemilu di Indonesia 2019 gerakan itu mulai ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Seluruh Rakyat Indonesia ingin memberontak kepada penguasa. Mereka yakin bahwasannya terdapat hal yang tidak baik di balik sistem pemerintahan sekarang. Awal mula *People power* sendiri terjadi pertama kali sekitar tahun 1986 yang terjadi di negara Filipina. Aksi tersebut bertujuan mengacu perdamaian pada revolusi sosial yang mengakibatkan bentuk protes seluruh rakyat Filipina melawan Presiden yakni pada waktu itu Presiden yang memimpin Filipina adalah Ferdinan Marcos yang telah berkuasa selama kurang lebih 20 tahun.[61] Protes di mulai saat Carazon Aquino, istri pemimpin dari oposisi yakni Benigno Aquino melakukan demonstrasi kampanye anti kekerasan untuk tujuan menjatuhkan Marcos dari kursi Presiden. Aquino melakukan protes keras sebagai bentuk dari deklarasi kemenangan yang dilakukan Marcos pada pilpres tahun 1986 di Filipina. *People power* di ketahui sebagai bentuk aksi perlawanan damai yang ditandai masyarakat berdemonstrasi turun ke jalanan setiap hari. Oleh karena itu dari pristiwa tersebut dianggap sebagai momen yang melahirkan demokrasi Filipina.

Gerakan aksi *people power* sendiri terjadi di Indonesia ketika jatuhnya rezim pada masa Presiden Soeharto yang dilakukan oleh demonstrai besar khususnya mahasiswa atau seluruh masyarakat pada Mei 1998 yang menuntut perubahan dan reformasi. Penyebab utama yang membuat rakyat Indonesia mengingkan perubahan adalah karena pada saat itu Indonesia mengalami masalah krisis moneter sejak juli 1997. Maka dari sebab itu rakyat Indonesia

[61] *"Apa Itu People Power"* (https://m.wartaekonomi.co.id/berita225169/apa-itu-people-power-html, diakses pada tanggal 26 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah tidak terbendung lagi dan ingin menuntut revolusi dan perubahan dengan cara turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

Dalam kasus people power 1998, presiden Soeharto juga di desak turun jabatan karena memang sudah sangat lama berkuasa dan juga melakukan tindakan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Demonstrasi besar-besaran ini terjadi di Jakarta dengan kerusahan pada Mei 1998 ini.[62] Yang pada saat itu berhasil memaksa Presiden Soeharto untuk mundur dan "menyatakan berhenti" dari jabatannya dalam sebuah pidato di Istana Negara pada tanggal 22 Mei 1998 dan ketika itu juga mandat presiden diganti oleh BJ Habibie. Dari masalah itulah lahir sebuah orde reformasi yang baru yang di tandai dengan lengsernya Presiden Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Itu adalah sedikit deskripsi tentang sebuah gerakah aksi *people power*.

C. Penyebab Gerakan Aksi People Power pasca Pilpres 2019

Sedangkan penyebab dari adanya gerakan aksi people power 2019 ini karena adanya permasalahan dalam pemilu 2019. pasangan 02 yakni Prabowo dan sandiaga merasa di rugikan karena pemerintah tidak netral dalam mengelar pemilu. Istilah *people power* terus memenuhi sudut-sudut tajuk berita akhir-akhir ini. Konsistensi politik pasca-Pilpres 2019 pun kian memanas dengan munculnya wacana itu. Wacana *people power* muncul dari ketua dewan PAN Amien Rais untuk bergerak melalui *people power* jika menemukan kecurangan saat pemilu. Menurutnya *people power* itu merupakan gerakan massa yang tidak ada setetes darah pun *people power* sah apabila memang ada kecurangan dalam

[62] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan pemilu. Amien mengatakan bahwa jika nantinya massa digerakkan situasi masih tetap damai karena ini bukan merupakan revolusi. *People power* atau gerakan rakyat menjadi kata kunci yang menonjol dalam orasi Amien Rais pada aksi 313 dan banyak memicu sorotan.[63]

Dan di sini Istilah kecurangan yang di maksud dari pihak 02 yakni terbagi menjadi 3 yaitu bersifat terstruktur, sistematis dan massif semua ini perlu pembuktian yang baik. Kecurangan terstruktur yakni apabila penyelenggara dan pejabat yang ingin sengaja memenangkan salah satu calon. Sistematis lebih cenderung mengacu pada pelanggaran yang dilakukan secara matang dan teratur. Dan juga massif adalah suatu pelanggaran yang dilakukan secara fatal di dalam tempat pemungutan suara.[64]

Pendapat Direktur Eksekutif Indonesia *public institute*, menurut Karyono Wibowo bahwa ada sebuah korelasi antara tuduhan kecurangan pada Pemilu dan wacana tentang people power atau pengerahan terhadap massa. "kecurangan itu berakibat pada gerakan *people power* yang ingin membuat kerusuhan pada pemilu.

Karyono menilai bahwa wacana *people power* yang di ucapkan pihak 02 sebagai upaya untuk menolak hasil pemilu tersebut. semua itu mirip dengan suatu gerakan kelompok oposisi di berbagai negara yang mengalami seperti instabilitas politik. Amien Rais selaku Mantan ketua MPR RI dan juga ketua BPN dari Prabowo & Sandiaga, kembali hadir dengan pernyataan yang memicu

---

[63] Tony Firman, *Seruan People Power Amien Rais dan Kegagalan People Power*, (https://tirto.id/seruan-people-power-amien-rais-dan-kegagalan-people-power-dkV4, Diakses pada tanggal 8 Oktober 2019.

[64] Yuliawati dan Fahmi Ramadhan, "*Gerakan People Power, Siasat Terakhir Prabowo Jelang 22 Mei"* (https://katadata.co.id/berita/2019/05/13/gerakan-people-power-siasat-terakhir-prabowo-jelang-22-mei, Diakses pada 26 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrovesi di dalam pembicaraan masyarakat. Dalam pernyataannya di dalam Aksi 313, Amien Rais menyatakan dirinya siap mendorong gerakan *people power* jika kecurangan terjadi pada pemilu 2019.[65]

Sangat sulit memang membayangkan terhadap negara demokrasi, terdapat penguasa yang memegang kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan, sementara itu konstitusionalitas pemerintahannya terus menerus dijadikan sebuah pertanyakan. Pemerintahan yang tidak didukung oleh basis konstitusional yang sah, tidak mungkin mampu menciptakan sebuah pemerintahan yang normal.[66]

Kalau benar terjadi, maka tidak akan lama lagi penguasa baru ini akan menjadi tempat protes masyarakat yang berpotensi mendorong terjadinya sebuah kudeta atau *People power* sekali lagi untuk tujuan memaksa mereka turun dari tampak kekuasaan. Sejak 1 April 2019 memang Amien Rais selalu menyuarakan ancaman akan mendorong masyarakat untuk berdemo bila kecurangan benar-benar terjadi dalam pemilu.

Amien kembali menggelorakan wacana *people power* saat pencoblosan pada 17 April. Dia meminta, khususnya pendukung atau saksi pasangan Prabowo-Sandiaga Uno untuk memotret C1-Plano atau catatan hasil asli penghitungan suara di masing-masing TPS.[67] Amien mengatakan bahwa rencana aksi tersebut adalah bagian dari pemberontakan sosial masyarakat kepada

---

[65] Ibid.,

[66] Yuliawati dan Fahmi Ramadhan, "*Gerakan People Power, Siasat Terakhir Prabowo Jelang 22 Mei"* (https://katadata.co.id/berita/2019/05/13/gerakan-people-power-siasat-terakhir-prabowo-jelang-22-mei, Diakses pada 26 September 2019.

[67] Marisa Safitri, *"Sejarah Kemunculan People Power dan Hubungannya dengan Indonesia"*(https://www.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/sejarah-kemunculan-people - power-dan-hubungannya-dengan-indonesia, Diakses pada Tanggal 08 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa. “Apabila benar terjadi kecurangan, kami semua akan mendorong masyarakat ke Monas untuk berdemonstrasi.

Pandangan Amien Rais tentang *people power* sendiri yakni people power itu bukan untuk mengganti rezim atau menjatuhkan presiden akan tetapi gerakan *people power* itu diatur dalam undang-undang selama tidak merugikan negara dan menimbulkan kehancuran. Beliau mengatakan *people power* itu konstitusional, demokrasi dan dijamin oleh HAM. Amien mengatakan, gugatan sengketa pemilu diajukan karena BPN merasa ada kecurangan dalam pemilu 2019 yang bersifat terstruktur.[68]

Seiring ditangkapnya Eggi Sudjana karena berbicara mengenai *people power*. Amien meminta agar masyarakat tak lagi menggunakan istilah *people power* tapi mengubahnya dengan gerakan Kedaulatan rakyat. Amien meminta untuk mengganti istilah itu karena untuk mengantisipasi penangkapan polisi terhadap ungkapan *people power*. menurut Koordinator BPN, Dahnil Anzar simanjuntak pun mengatakan apa yang diungkapkan oleh Amien merupakan satire politik soal penangkapan terhadap beberapa orang karena istilah *people power* itu. *People power* itu bukan sesuatu yang sebenarnya menakutkan. Lagi pula hal yang sebenarnya dari *people power* sebuah ungkapan protes dari masyarakat. *People power* itu merupakan ungkapan protes masyarakat. Pemilu

[68] *“Ini Pengertian “People Power” Versi Amien Rais Bukan Untuk Jatuhkan Presiden”,* (https://kupang.tribunnews.com/2019/05/25ini-pengertian-people-power-versi-amien-rais-bukan-untuk-jatuhkan-presiden, Diakses pada 30 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu juga *people power*. jadi, saya mau mengatakan bahwa yang tidak boleh itu berbuat anarkisme karena itu merupakan tindakan makar.[69]

D. Bagaimana Terjadinya Gerakan People Power pasca Pilpres 2019

Setelah itu bagaimana terjadinya sebuah pergerakan *people power*, memang di tahun 2019 ini terutama pada saat sebelum pilpres dan sesudah pilpres sempat ramai isu tentang sebuah gerakan *people power* yang menjadi sebuah trending topic di segala media di indonesia waktu itu. Gerakan ini di dalangi oleh kelompok dari 02 untuk mengantisipasi adanya sebuah kecurangan pada saat pemilu 2019 dilaksanakan narasi provokatif dan agitatif yang diserukan sejumlah elite politik, agamawan dan kalangan intelektual harus dihentikan demi persatuan bangsa.[70]

Istilah *People Power* semakin banyak terdengar dalam wacana politik usai pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Secara sederhana, istilah "people power" itu dimaksudkan sebagai penggunaan kekuatan massa (rakyat) untuk mendesak sebuah perubahan politik atau pergantian kekuasaan di suatu negara. Sejatinya *people power* memang dimaksudkan sebagai gerakan sosial anti kekerasan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat sebagai bentuk protes terhadap kondisi pemerintahan. Gerakan ini umumnya dilakukan dalam sebuah

---

[69] "*People Power Ganti Istilah Jadi Gerakan Kedaulatan Rakyat"*, (https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190514185611-32-394857/people-power-ganti-istilah-jadi-gerakan-kedaulatan-rakyat, Diakses pada 8 Oktober 2019.

[70] *"People Power, Jalan Menuju Jurang Kekacauan"*(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190520073757-32-396363/people-power-jalan-menuju-jurang-kekacauan, Diakses pada tanggal 27 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rezim pemerintahan yang bertindak otoriter. Ciri lain *people power* adalah penggerak utama gerakan ini yaitu Masyarakat.[71]

Inti dari gerakan ini merupakan wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim pemerintahan. Gerakan ini bertujuan untuk memprotes hasil rekapitulasi KPU yang memang dapat digolongkan sebagai *people power*, memang benar bahwa gerakan ini dilakukan atas dasar ketidakpuasan beberapa pihak atas penyelenggaraan pemilu pada 2019. Tapi gerakan ini justru disusupi oleh para elite politik dari pendukung salah satu kontestan pemilu. Jadi, *people power* pada 22 Mei itu tidak ubahnya upaya mobilisasi massa dengan narasi provokatif dan yang diserukan oleh sejumlah elite politik, agamawan, hingga kalangan intelektual.[72]

Gesekan sosial di Indonesia ini memang sebetulnya dapat diantisipasi apabila penyebabnya diketahui. Ada beberapa penyebab dengan mudahnya terjadi gesekan sosial di Indonesia. *Pertama,* menurunya fungsi partai politik seharusnya bertangung jawab dalam mengatur sebuah konflik yang terjadi. Bukan hanya berfokus pada kepentingannya saja dan tidak menjalani fungsi penddikan politiknya. Apalagi bila partai menarik masyarakat untuk masuk dalam pusaran konflik itu. *kedua,* kesalahan dalam berpolitik Ketika sebuah partai gagal dalam membina kader untuk menjadi pemimpin, yang muncul justru ketokohan seorang individu yang bertindak tidak baik.

---

[71] Mouzila K.Donna Sweinstani, *"People Power dalam Dinamika Elektoral"*(https://kolom.tempo.co/read/1208766/people-power-dalam-dinamika-elektoral/full?view=ok, Diakses pada Tanggal 08 Oktober 2019.
[72] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, suatu identitas politik menguat. Dalam konotasi yang positif, identitas diperlukan untuk mendulang suara kontestan. Namun, jika identitas dipolitisasi yang terjadi justru pengkotak-kotakan masyarakat yang mengakibatkan kami lawan mereka. *Keempat*, penurunan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Dalam kasus 22 Mei contohnya demonstran tidak mempercayai terhadap KPU sebagai pihak yang memang memiliki legitimasi untuk menetapkan hasil pemilu dan MK sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Apa yang terjadi di Indonesia sesungguhnya dapat diantisipasi apabila masing-masing pihak menyadari isu yang tidak baik tersebut. Partai politik turun tangan untuk mengatasi permasalahan itu walaupun tidak terlibat sebagai institusi demokrasi, setidaknya elite partai politik dapat mengajak para pendukung fanatiknya untuk bersiap menjadi warga Negara dengan sikap kedewasaan dalam berpolitik.[73]

Guru Besar Hukum Tata Negara Yusril Mahendra berpendapat bahwa pada umumnya, people power itu digunakan untuk meruntuhkan sebuah rezim yang berkuasa relatif lama dan dianggap diktator, sewenang-wenang dan menyengsarakan masyarakat.[74]

People power sendiri biasanya terjadi karena adanya upaya-upaya normal konstitusional untuk melakukan perubahan terhalang oleh kekuatan rezim, baik menggunakan kekuatan militer maupun kekuatan lembaga-lembaga

[73] Mouzila K.Donna Sweinstani, *"People Power dalam Dinamika Elektoral"*(https://kolom.tempo.co/read/1208766/people-power-dalam-dinamika-elektoral/full?view=ok, Diakses pada Tanggal 08 Oktober 2019.
[74] *"People Power, Jalan Menuju Jurang Kekacauan"*(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190520073757-32-396363/people-power-jalan-menuju-jurang-kekacauan, Diakses pada tanggal 27 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusional dan juga administrasi yang di rekayasa begitu rupa untuk melenggengkan sebuah kekuasaan. Dalam konteks pemilu 2019 ini, menurut Yusril ada berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya *people power*, menurutnya Presiden Joko Widodo memang baru memerintah kurang dari lima tahun dalam periode pertama jabatannya. Ia secara sah dan konstitusional memang berhak untuk maju dalam pemilihan Presiden periode kedua.[75]

Walaupun, kata Yusril tentu terdapat sebuah kekuragan dan kesalahan selama menjalankan pemerintahannya pada periode pertama, namun belum nampak juga Presiden Jokowi menjalankan kekuasaan secara diktator dan sewenang-wenangnya seperti halnya yang dilakukan oleh Marcos dan Soeharto.[76]

Ungkapan *people power* sekarang memang banyak disebabkan oleh anggapan bahwasannya pemilu 2019 berjalan secara curang. Kecurangan itu bersifat secara TSM (Terstuktur, Sistematis dan Masif) yang melibatkan aparat Negara dan penyelenggara Pemilu dengan sengaja memenangkan Calon Presiden terpilih dan mengalahkan pasangan capres-cawapres yang lainnya. [77]

Memang dalam kenyataanya baik perhitungan secara cepat *Quick Count* maupun perhitungan nyata Real Count KPU, untuk sementara itu Pasangan Joko Widodo dan Ma'aruf Amin memang unggul sekitar 10-11 persen dari pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Oleh sebab itu hasil perhitungan suara yang akan menentukan pasangan mana yang akan menang, kewenangan itu ada

[75]Ibid.,
[76]Ibid.,
[77] *"People Power, Jalan Menuju Jurang Kekacauan"*(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190520073757-32-396363/people-power-jalan-menuju-jurang-kekacauan, Diakses pada tanggal 27 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pihak KPU. Tidak ada lembaga apapun selain KPU yang mempunyai kewenangan dalam menyetakan kemanangan pada pilpres ini.

Dan juga Mahkamah Konstitusi (MK) pun hanya berwenang untuk memutuskan sengketa perhitungan suara dalam pilpres. Setelah MK memutuskan barulah kemudian tidak lanjut ada dalam keputusan KPU. Keputusan dari KPU itulah yang nantinya akan dijadikan dasar oleh MPR untuk menyelenggarakan sebuah sidang dalam melantik dan mendengar ucapan sumpah jabatan presiden, sebagai mana tertulis dalam ketentuan UUD 1945. Tanpa melalui proses itu semua tidak ada siapapun yang dapat mengaku dirinya atau di daulat oleh sejumlah orang menjadi presiden RI.[78]

Maka tindakan tersebut dilakukan dalam perspektif hukum tata negara adalah inkonstitusional dan merupakan sebuah kejahatan terhadap keamanan negara. Untuk penyelenggara Pilpres 2019, jika memang salah satu pasangan calon presiden dan para pendukungnya menyatakan ada kecurangan, maka kecurangan itu tidak dapat dinyatakan secara apriori sebuah kebenaran.[79]

Akan tetapi menurut Ketua PAN Amien Rais untuk mencegah kecurangan pemilu, Amien menyatakan dia akan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika memang ada kecurangan dengan menggerakan massa alias *people power* akan tetapi istilah itu sekarang diganti yakni gerakan kedaulatan rakyat.

---

[78] Ibid.,

[79] *"People Power, Jalan Menuju Jurang Kekacauan"*(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190520073757-32-396363/people-power-jalan-menuju-jurang-kekacauan, Diakses pada tanggal 27 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang saat itu beliau mengatakan akan menggerakan massa secara demokratis.[80]

Dia pun menjamin bahwa gerakan ini tidak ada kekerasan bila nantinya massa memprotes keputusan KPU. Ia mengatakan juga bahwa gerakan ini bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah, ini tanpa sedikit pun darah tercecer, *people power* akan digunakannya. Rencana Amien menggerakan massa itu pun banyak mendapat tanggapan. Ada yang mendukung, ada pula yang mengkritik karena menilai ucapan Amien seolah-olah tak mematahui undang-undang.[81]

Akan tetapi setelah pemungutan suara pemilu 2019 telah selesai, Amien pun mengakhiri penggunaan istilah *people power* dan digantikannya sebagai gerakan kedaulatan rakyat. Itu dilakukan karena pada waktu itu Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara *people power* maka dari itu kita menggunakan istilah gerakan kedaulatan rakyat. Amien berharap tak ada yang menghalangi penggunaan istilah itu. Dia mengatakan, jika nantinya ada yang menghalangi pendukung Prabowo dengan istilah baru "kedaulatan rakyat", penghalang itu akan digilas.[82]

Menurutnya siapapun yang berhadapan dengan gerakan kedaulatan rakyat kita gilas bersama. Pendapat lain dari seorang peneliti Politik Ilmu Pengetahuan Indonesia Wasisto Raharjo Jati memprediksi bahwa gerakan tersebut bakal antiklimaks.

---

[80] Ibid.,
[81] Ibid.,
[82] *"People Power, Jalan Menuju Jurang Kekacauan"*(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190520073757-32-396363/people-power-jalan-menuju-jurang-kekacauan, Diakses pada tanggal 27 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya ada berbagai faktor yang membuat gerakan *people power* pada tanggal 22 Mei 2019 antiklimaks. Di antaranya banyaknya tokoh yang keras menyeruhkan people power mulai dibungkam. Belum lagi juga kata Wasisto, soliditas BPN saat ini diragukan karena BPN terkesan lepas tangan dengan gerakan ini. Mereka menyebut tidak berencana melaksanakan *people power* dalam menyikapi masalah pemilu.[83]

Pengamat Politik Universitas Padjajaran Muradi mengatakan bahwa memang hal itu merupakan indikasi bahwa gerakan ini akan gembos dan tidak sebesar yang digadang-gadangkan. Perubahan *people power* menjadi kedaulatan rakyat menunjukan bahwa mereka tidak berani menggunakan simbol *people power* karena memang *people power* ini massanya ratusan ribu hingga jutaan. Pengamatan Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan gerakan *people power* ini takkan berkembang menjadi besar. Layunya gerakan itu, menurutnya karena *people power* harusnya mewakili seluruh masyarakat Indonesia.[84]

Akan tetapi yang ada saat ini gerakan *people power* hanya digunakan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan kepentingan politik partisan saja. Menurutnya, orang yang berunjuk rasa di depan KPU, Bawaslu hanya orang itu-itu saja, dan lebih tepat disebut partisan *people power* yang dengan mudah mengklaim nama suatu rakyat. Adi menilai seharusnya Prabowo seharusnya bersikap legawa seperti seorang ksatria apabila di dalam pengumuman

[83] *"People Power, Gerakan Layu Sebelum Berkembang"*(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190516164035-32-395501/people-power-gerakan-layu-sebelum-berkembang, Diakses pada tanggal 27 September 2019.
[84] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan kalah, menrutnya sebagai seorang negarawan alangkah baiknya ia mengeluarkan pernyataan dan juga narasi yang meneduhkan dan berbesar hati dalam menerima hasil pilpres 2019.[85]

E. Dampak Aksi Gerakan People Power pasca Pilpres 2019

Kemudian selanjutnya yakni mengenai dampak dari sebuah gerakan people power 2019 tersebut. Mantan panglima TNI Moeldoko itu juga meminta agar isu pengumpulan massa pada 22 Mei dipahami betul oleh masyarakat tentang dampak dan kerugiannya. Moeldoko pun menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu berbondong-bondong ke sebuah tempat titik berkumpul. Ia memperingatkan, hal itu pada akhirnya akan digunakan oleh kelompok tertentu untuk mencapai kepentingan mereka. Menurutnya masyarakat saat ini tidak menginginkan gerakan *people power* yang pada akhirnya akan merugikan warga indonesia sendiri.[86]

Dampak lain adalah yakni pengambil-alihan kekuasaan secara paksa dengan menggunakan cara-cara di luar konstitusi yang berlaku tersebut. Revolusi yang ada dengan sendirinya akan menciptakan sebuah kekuasaan yang sah. Jika pemimpin revolusi berhasil mempertahankan kekuasaannya yang baru, maka kekuasaan tersebut akan menjadi sah secara konstitusional. Akan tetapi turunnya kekuasaan Marcos, Soekarno dan Soeharto terjadi bukan karena revolusi, tetapi karena suatu gerakan *people power* maka memang seharusnya

---

[85] Ibid.,

[86] *"Moeldoko Ungkap Skenario dan Dampak Buruk Gerakan People Power 22 Mei 2019 : Ini Bukan Hal Main-Main"* (https://wartakota.tribunnews.com/2019/05/20/moeldoko-ungkap-skenario-dan-dampak-buruk-gerakan-people-power-22-mei-2019-ini-bukan-hal-main-main, Diakses pada tanggal 28 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa baru harusnya memenuhi legitimasi konstitusional dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan norma-norma yang ada dalam sebuah negara tersebut.[87]

Sangat sulit memang membayangkan pada sebuah Negara demokrasi, ada penguasa yang memang memegang kekuasaan dan menjalankan roda pemerintahan, akan tetapi tidak mampu menciptakan pemerintahan yang normal. Kalau itu beneran terjadi maka dampaknya akan berpotensi mendorong terjadinya sebuah kudeta atau *people power* sekali lagi untuk memaksa mereka turun dari tampuk kekuasaan. Di sini fokus utamanya gerakan *people power* ini karena dari pihak 02 sendiri menolak hasil pemilu karena dianggap curang dan juga tidak mempercayai hasil penghitungan KPU.[88]

Menolak hasil presiden terpilih dan dilantik secara konstitusional berpotensi besar membawa negara ini ke dalam kekacauan yang tak berujung. Jadi, presiden pemenang hasil pilpres 2019 akan terancam ditolak untuk dilantik menjadi presiden oleh MPR pada tanggal 20 oktober di karenakan adanya sebuah gerakan *people power* maka siapa yang berhak menjalankan kekuasaan sebagai presiden. Karena tanpa dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai presiden periode 2 secara jelas jokowi tidak sah untuk menjadi presiden.

Sementara itu di lain pihak presiden yang kalah pilpres, tetapi mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden akan tetapi tidak mempunyai legitimasi konstitusional apapun untuk memerintah. Karena kalau mereka memaksakan untuk menjadi presiden dengan cara kudeta merebut kekuasaan

---

[87] Yusril Ihza Mahendra, *"People Power" Akhirnya Akan Mencari Legitimasi Konstitusional"*(https://m.detik.com/news/kolom/d-4555740/people-power-akhirnya-akan-mencari-legitimasi-konstitusional, Diakses pada Tanggal 28 September 2019.
[88] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentu tidak akan membawa kebaikan dan kemaslahatan apapun bagi bangsa dan negara ini.[89]

Terlepas dari itu semua pemaknaan lain *people power* semacam kekuatan rakyat yang sejati dalam konteks demokrasi tidak lain adalah semangat untuk berpartisipasi. Partisipasi politik menjadi fondasi utama yang menentukan seberapa tinggi kualitas demokrasi kita.[90]

Setidaknya terbagi menjadi 2 yakni partisipasi memilih bagaimana telah bersama-sama kita jalankan saat pemilu kemarin, maupun yang tak lain partisipasi dalam permusyawaratan untuk mengisi ruang publik menuju pemilu lima tahun ke depan. Demokrasi kita harus diakui masih sangat terpengaruh oleh teladan para elite. Akan sangat berat mengupayakan demokrasi permusyawaratan manakala pemberitaan di media seringkali mengesankan elite yang egosentris dan hanya ingin di dengarkan tanpa bersedia mendengarkan.

Bahwasannya kekuatan rakyat (*people power*) dalam konteks demokrasi permusyawaratan mengandaikan inklusivitas hubungan vertikal antara elite dan juga massa maupun horisontal di antara massa sendiri. Bukannya saling ekslusif dan memang sendiri. Semangat *people power* seharusnya mampu mencairkan kebekuan-kebekuan akibat egosentrisme pandangan dan kepentingan demi menguatkan rakyat (*demos*) dalam pengelolaan kebangsanegaraan (*kratein*).

---

[89] Yusril Ihza Mahendra, *"People Power" Akhirnya Akan Mencari Legitimasi Konstitusional"*(https://m.detik.com/news/kolom/d-4555740/people-power-akhirnya-akan-mencari-legitimasi-konstitusional, Diakses pada Tanggal 28 September 2019.

[90] Fahrul Muzaqqi, *"People Power" dan Sumbatan Demokrasi"* (https://m.detik.com/news/kolom /d-4560206/people-power-dan-sumbatan-demokrasi, Diakses pada Tanggal 28 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alhasil, semoga para elit politik segera menginsyafi hal ini sehingga rekonsiliasi pasca pemilu berjalan efektif dan integrasi bangsa tetap terjaga.[91]

Akan tetapi pandangan lain dari kelompok BEM mahasiswa juga menolak dan tidak sepakat dengan gerakan itu. Gerakan *people power* di anggap berpotensi menimbulkan perpecahan yang bisa berdampak pada korban jiwa, politik dan ketidakstabilan perekonomian. Sikap tegas itu diambil setelah melakukan kajian fokus terhadap *people power*, dan mengetahui dampak positif dan negatif ternyata dampak negatifnya lebih besar. Maka dari itu mereka menolak gerakan tersebut. Menurut salah satu mahasiswa akan berusaha semaksimal mungkin melakukan sebuah edukasi ke publik akan bahayanya *people power*, dengan harapan agar masyarakat tidak ikut-ikut terbawa arus kepentingan di dalam *people power*.[92]

Andi selaku BEM mahasiswa mengatakan bahwa siapapun presiden terpilih sesuai dengan konstitusi nantinya, maka semua pihak harus menerimanya karena sudah pilihan rakyat. Pemimpin yang terpilih harus bisa menciptakan rasa aman, damai, rukun tertib dan bersatu bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebaliknya pemimpin yang kalah dalam pertarungan pilpres, tidak boleh mengedepankan egonya dengan melakukan gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan perpecahan bangsa. Karena memang sejatinya masyarakat ingin

[91] Fahrul Muzaqqi, *"People Power" dan Sumbatan Demokrasi"* (https://m.detik.com/news/kolom /d-4560206/people-power-dan-sumbatan-demokrasi, Diakses pada Tanggal 28 September 2019.
[92] Fadel Prayoga,*"Tolak People Power, Gerakan BEM Jakarta Sebut Banyak Dampak Negatifnya"* (https://news.okezone.com/read/2019/05/16/605/2056683/tolak-people-power-gerakan-bem-jakarta-sebut-banyak-dampak-negatifnya, Diaksess pada Tanggal 8 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedamaian dan kerukunan, keadilan dan kesejahteraan. Bukan perpecahan seperti itu.[93]

Menurut penulis dampak yang timbul paling utama yakni timbulnya suatu kekerasan terhadap sesama umat manusia. Dan juga terpecahnya demokrasi Indonesia yang selalu di junjung tinggi yakni bermusyawarah terhadap masyarakat, dan timbulnya people power 2019 pasca pilpres ini menjadikan permasalahan ini cukup serius karena masyarakat Indonesia khusunya pihak 02 tidak mempercayai penghitungan real yang dilakukan oleh KPU padahal KPU lah yang menentukan siapa yang menang dalam pemilu 2019 kali ini. Dan juga dengan adanya provokasi pihak 02 terhadap para oposisi-oposisi masyarakat ini menimbulkan permasalahan yang secara langsung masyarakat Indonesia sekarang tidak begitu percaya dengan sebuah pemerintahan yang mana mereka anggap pemilu pilpres 2019 ini tidak netral dan banyak kecurangan yang mereka sengaja untuk memenangkan salah satu calon dan merugikan calon lainnya.

[93] Fadel Prayoga,*"Tolak People Power, Gerakan BEM Jakarta Sebut Banyak Dampak Negatifnya"* (https://news.okezone.com/read/2019/05/16/605/2056683/tolak-people-power-gerakan-bem-jakarta-sebut-banyak-dampak-negatifnya, Diaksess pada Tanggal 8 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TEORI KUASA MICHEL FOUCAULT TERHADAP GERAKAN "PEOPLE POWER" PASCA PILPRES 2019

A. Aktor di Balik Gerakan Aksi People Power 2019

Ada banyak sekali aktor yang menyerukan wacana *people power* pasca sebelum dan sesudah pilpres 2019. Itu semua dilakukan karena adanya kekecewaan dari salah satu kontestan pilpres yakni pasangan nomer urut 02 Prabowo dan Sandiaga Uno. Kekecewaan itu diungkapkan oleh para aktor politik terutama yang memihak terhadap 02 dan yang mendukung gerakan aksi *people power* yang rencananya akan di gelar pada tanggal 22 Mei 2019.

Gerakan itu dipicu karena pihak 02 merasa pilpres 2019 telah terdapat kecurangan. Padahal kalau dilihat seluruh masyarakat tidak begitu tertarik dengan gerakan tersebut bahkan dari Prabowo dan Sandiaga pun tidak begitu mendukung dengan gerakan itu. Hanya saja Prabowo menyebut bahwa demonstrasi yang digelar bukan bertujuan makar atau menggulingkan pemerintahan yang sah hanya bertujuan untuk semata-mata menegakkan keadilan. Para aktor pendukung lain yang begitu antusias terhadap gerakan itu antara lain Amien Rais dan Eggi Sudjana yang mewakili dari BPN Paslon 02 yang memang begitu antusias dengan gerakan itu, Fadli zon dan Fahri Hamzah yang merupakan wakil dari partai politik yang sama-sama mendukung gerakan *people power* itu, dari golongan Front Pembela Islam (FPI) yakni Habieb Rizieq dan Bagdad Abdul Jabbar yang mewakili kelompok keagamaan yang memang mendukung gerakan itu, dan juga para tokoh masyarakat yakni Titiek Soeharto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga dari golongan pengamat yakni Mahfud MD beliau mewakili golongan tokoh masyarakat yang memang sangat mendukung gerakan tersebut. dan juga perwakilan dari para pengamat yang mendukung dan juga menolak gerakan *people power* itu. Itu semua direncanakan semata-mata sebagai bentuk strategi seorang penguasa di dalam kelompoknya. Seperti menurut pemikiran Michel Foucault bahwasannya kekuasaan adalah suatu bentuk strategi yang dilakukan terhadap kerumitan di dalam masyarakat tertentu dan itu dilakukan oleh kelompok yang menguasai karena memang kekuasaan itu berada di mana-mana dan yang dapat mengatur semuanya.

Pertama, Amien Rais merupakan seorang politikus lama yang beliau sendiri menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pemenang Nasional (BPN) dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang dulunya pernah menjabat sebagai ketua MPR dan juga beliaulah yang mendirikan partai PAN dan juga yang menjadi ketua dari partai tersebut. pada tahun 2004 ia pernah mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Dan juga Eggi Sudjana ia merupakan seorang politikus dan praktisi hukum yang dikenal juga sebagai pendukung Prabowo Subianto dan ia merupakan BPN dari Prabowo-Sandiaga Uno. Amien Rais dan Eggi Sudjana mewakili BPN dari Prabowo-Sandiaga yang memang sangat mendukung gerakan itu karena dalam mengelar aksi *people power* 2019. Amien lah yang paling mendukung gerakan itu. Amien menyeruhkan *people power* karena tidak percaya dengan pihak KPU ia menilai pilpres 2019 ini telah terjadi dugaan kecurangan dan berencana akan mengerahkan massa jika timnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan bukti kecurangan secara sistematik, terukur dan masif.[94] Begitu juga Eggi Sudjana ia mengatakan bahwa *people power* merupakan gerakan rakyat. Ia menghimbau bahwa gerakan *people power* itu bukan makar. Karena memang tidak mempersoalkan pemerintahan yang sah hanya saja mempersoalkan capres yang sah atau dengan kata lain capres yang berbuat curang.[95]

Kedua, aktor lain yakni adalah Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang sama menjabat wakil ketua DPR dan beliau mewakili dari kelompok partai politik yang memang mendukung gerakan *people power* ia menganggap bahwa tidak ada yang salah dengan seruan *people power* yang muncul setelah pemilu 2019. Fadli Zon mengatakan bahwasannya *people power* itu salah satu tindakan konstitusional jadi tidak ada yang salah dalam melakukannya karena memang hanya terfokus pada protes kecurangan dalam pemilu 2019.[96] Kemudian Fahri Hamzah yang memang salah satu partisan politik yang berpendapat tentang munculnya gerakan *people power* 2019 beliau menilai bahwa ucapan Amien Rais tentang *people power* merupakan bentuk peringatan keras jika ada kecurangan dalam pemilu karena bibit-bibit kecurangan itu memang harus di

---

[94] *"People Power Amien Rais, Gertakan dari Orang Tak Terpakai",*(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190401105414-32-382494/people-power-amien-rais-gertakan-dari-orang-tak-terpakai, Diakses pada tanggal 21 Desember 2019.

[95] *"Ditetapkan sebagai tersangka 'people power',Eggi Sudjana bantah lakukan 'ajakan makar',* (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48211173, Diakses pada Tanggal 21 Desember 2019.

[96] Jessi Carina, *Fadli Zon : Saya Melihat "People Power" Biasa-biasa Saja,*(https://nasional.kompas.com/read/2019/05/14/17105271/fadli-zon-saya-melihat-people-power-biasa-biasa-saja, Diakses pada tanggal 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atasi secara baik. Karena memang apabila dibiarkan maka akan bisa menjadi besar dan sangat fatal dalam demokrasi kita.[97]

Ketiga, aktor lain yakni dari kelompok agamawan yaitu golongan Front Pembela Islam (FPI) yang diketuai oleh Habieb Rizieq dan juga Bernard Abdul Jabbar yang merupakan jebolan dari Aksi 212 ia adalah korlap dari para aktivis jebolan 212 yang dulu pernah berdemonstrasi terhadap Ahok yang di anggap melakukan penistaan agama. Beliau merupakan perwakilan dari kelompok keagamaan yang memang sama-sama pendukung dari capres Prabowo Subianto dan juga mendukung langsung gerakan *people power* tersebut. Habieb Rizieq mengatakan bahwa *people power* itu konstitusional bukan makar. Menurutnya hanya orang yang tidak mengerti hukum saja yang mengatakan bahwasannya *people power* adalah makar.[98] Dan juga Bernard dengan pernyataannya bahwasannya gerakan *people power* merupakan sesuatu yang konstitusional bukan inkonstitusional jadi menurut para aktor tersebut sah-sah saja melakukannya karena itu hanya sebagai bentuk protes rakyat terhadap pelaksanaan pemilu 2019 yang dianggap curang dan itu bukan merupakan sesuatu yang makar itu adalah cara aktor dalam memobilisasi massa.

Keempat, aktor lain yakni dari kelompok yang mewakili tokoh masyarakat yakni Titiek Soeharto. Titiek Soeharto yang merupakan tak lain mantan istri dari Prabowo Subianto yang selalu mendukung penuh pencalonan

---

[97] Tsarina Maharani, *"Fahri:Seruan People Power Amien Rais Peringatan Keras,* (https://m.detik.com/news/berita/d-4493128/fahri-seruan-people-power-amien-rais-peringatan-keras, Diakses pada tanggal 26 Desember 2019.

[98] Nancy Junita, *"Alasan Habib Rizieq Shihab 'People Power'Konstitusional dan Bukan Makar,* (https://m.bisnis.com/kabar24/read/20190423/15/914536/alasan-habib-rizieq-shihab-people -power-konstitusional-dan-bukan-makar, Diakses pada tanggal 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prabowo Subianto maka dari itu beliau mendukung gerakan *people power* 2019. Menurutnya pihaknya menggelar demonstrasi dama pada tanggal 22 Mei 2019 aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes penyelanggara pemilu 2019 yang dinilai telah melakukan kecurangan.[99]

Kelima, aktor dari tokoh ini yakni Mahfud MD yang memang mewakili kelompok pengamat politik yang tidak begitu mendukung dalam geakan *people power* 2019. Ia berpendapat tentang *people power* bahwasannya Dan kemuadia Mahfud MD yang memang dari kelompok tokoh masyarakat yang memang berpendapat bahwasannya *people power* itu sudah merupakan semacam hak pilihnya dalam pemilu. Karena rakyat bersatu dalam memilih dengan tujuan untuk perubahan. Itulah *people power* yang sesunguhnya rakyat bersatu demi mewujudkan perubahan.[100]

Dalam pandangan teori kuasa Michel Foucault dijelaskan bahwasannya kekuasaan itu ada di mana-mana. Memang dari kelima aktor tersebut mempunyai sebuah kekuasaan di dalam bidangnya masing-masing karena menurut Foucault kekuasaan itu menyebar. Dan kelima aktor itulah yang mempunyai pengetahuan cukup tinggi dalam berpolitik sehingga memunculkan klaim bahwasannya pemilu telah terjadi kecurangan sehingga muncul wacana *people power* sebagai bentuk protes masyarakat yang di wakili oleh para aktor-aktor tersebut. dan juga para pengamat politik yang memang mempunyai

---

[99] *"BPN Gelar Aksi Damai Bukan People Power, Tapi Dilakukan 3 Hari. FPI Pastikan Ikut Serta Setiap Hari",* (https://wartakota.tribunnews.com/2019/05/18/bpn-gelar-aksi-damai-bukan-people -power-tapi-dilakukan-3-hari-fpi-pastikan-ikut-serta-setiap-hari, Diakses pada tanggal 25 Desember 2019.

[100] Ristu Hanafi, "*Mahfud MD: Rakyat Sudah Lakukan People Power", Kita Terima Hasilnya*, (https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4517177/mahfud-md-rakyat-sudah-lakukan-people-power-kita-terima-hasilnya, Diakses pada tanggal 25 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan dan pengetahuan cukup tinggi sehingga berani untu mebenarkan apa maksud sebenarnya dari gerakan *people power* tersebut.

B. Kompetensi Aktor dalam Gerakan Aksi "People Power" 2019

Dari kelima aktor tersebut sama-sama mempunyai bidang kompetensi yang cukup menjanjikan dalam mencuatnya wacana gerakan aksi *people power* 2019. Orang-orang tersebut memang mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi dalam lingkungannya. Menurut Foucault kekuasaan itu merupakan suatu strategi dan gerakan itu semacam strategi yang bertujuan untuk memprotes hasil pemilu 2019 karena dianggap curang. Tanpa dimensi kompetensi dari para aktor tersebut tidak akan pernah muncul sebuah wacana tentang gerakan aksi *people power* tersebut.

Pertama, dari golongan BPN 02 yang diwakili oleh Amien Rais dan Eggi Sudjana. Amien memang belakangan ini kerap memicu kontroversi dalam pernyataanya pada saat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Beliau merupakan salah seorang yang berkompeten sangat tinggi ia merupakan salah satu seorang aktivis yang pada masa awal reformasi yang ditandai lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998.[101] Amien memang sangat kontra terhadap rezim Orde Baru Ia memang begitu terlibat dalam aksi *people power* 1998. Beliau selalu mengkritik pemerintahan yang pada saat itu bertindak otoriter dan Indonesia mengalami krisis moneter. Maka tidak heran dengan pengalaman yang beliau punya yang turut andil dalam mengsuseskan *people*

[101] Okky Budi, "*Karier Akademik dan Politik Amien Rais yang Patut Diacungi Jempol,* (https://www.moneysmart.id/prestasi-karier-amien-rais/, Diakses pada 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

power 1998. Dengan itu beliau begitu mudah dalam menyerukan gerakan aksi *people power* 2019.

Ia menghimbau bahwasannya demokrasi di Indonesia ini sedang mengalami kecacatan karena disusupi oleh para elit politik yang mengatur pemilu 2019 untuk memenangkan secara sengaja salah satu calon. Maka dari itu ia memobilisasi massa dengan seruan bahwa demokrasi Indonesia sedang tidak sehat. Lewat wacana gerakan aksi *people power* itulah berharap seluruh masyarakat setuju dan mau mengikutinya. Dengan tujuan yakni agar gerakan itu berhasil maka dilaukukanlah semacam provokasi bahwa pemilu curang. Itu semua diharapkan dapat menarik seluruh masyarakat terhadap gerakan yang Amien rencanakan yakni *people power* pasca pemilu 2019. Dan juga Eggi Sudjana bahwasannya ia juga mendukung gerakan aksi *people power* yang direncanakan oleh Amien Rais terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2019. Ia merupakan salah satu tokoh yang ditangkap polisi dalam pidatonya tentang *people power* karena di anggap makar oleh beberapa pihak tertentu..[102]

Kedua, tokoh yang kompeten dalam gerakan ini yang mewakili kelompok partai adalah Fadli zon dan juga Fahri Hamzah yang merupakan wakil ketua DPR. Fadli Zon merupakan seorang tokoh yang selalu mengkritik terutama di media sosial. Ia memang terkesan sangat vokal di dalam media sosial rekam jejaknya juga menunjukkan bahwa ia aktif dalam aktivisme politik

[102] *"Profil Eggi Sudjana, Tersangka Makar:* (https://m.tribunnews.com/nasional/2019/05/09/profil-eggi-sudjana-tersangka-makar-pengacara-rizieq-shihab-hingga-pernah-jadi-cagub-jatim?page=2, Diakses pada Tanggal 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memimpin berbagai demonstrasi ia merupakan jebolan Universitas Indonesia.[103]

Dari seluruh bidang kompetensi yang ia memiliki maka tidak heran beliau mendukung Prabowo dalam pilpres kali ini karena ia merupakan seorang politisi dari partai Gerindra. Maka dari semua pengalaman yang ia punya tidak heran bahwa beliau berani mengkritik dan mendukung gerakan *people power* yang di rencanakan oleh pihak 02 dengan mengatakan bahwa *people power* itu biasa-biasa saja karena tujuannya adalah memprotes kecurangan jadi itu konstitusional.

Kemudian Fahri Hamzah ia merupakan seorang partai politik yang dulunya adalah seorang aktivis. Dan ia salah satu tokoh yang ikut berperan dalam melawan rezim orde baru yang pada waktu itu dikuasai oleh Soeharto pada 1998. Sampai sekarang beliau masih aktif di dalam ranah politik di Indonesia karena ia memang cenderung suka mengkritik hal baru yang ada di Indonesia khusunya Gerakan *people power* 2019. Maka tidak heran dengan kompetensi yang dimiliki pada waktu itu maka Fahri Hamzah cukup punya pengalam tentang maksud dari gerakan *people power* itu. Beliau mengatakan bahwa gerakan *people power* pak Amien itu hanya sebagai pengingat agar kecurangan tidak terjadi. Fahri mengatakan bahwa *people power* tidak bisa

[103] M39, *Mengintip Isi Kepala Fadli Zon*, (https://www.pinterpolitik.com/mengintip-isi-kepala-fadli-zon/, Diakses pada Tanggal 21 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan sebagai mobilisasi masa. Ia mengatakn bahwa massa itu bisa bergerak sendiri jika memang melihat ada indikasi kecurangan dalam pemilu 2019.[104]

Ketiga, aktor lain yakni dari kelompok FPI yang diketuai oleh Imam Besar Habieb Rizieq dan juga Bernard Abdul Jabbar beliau adalah perwakilan dari kelompok Keagamaan yang mempunyai cukup banyak seorang pengikut. Habieb Rizieq sangat kompeten dan mendukung dalam gerakan aksi *people power* 2019 karena menurutnya gerakan itu sah-sah saja dan konstitusional. Gerakan itu semacam sebuah protes masyarakat terhadap rezim penyelenggara pemilu 2019 dan bukan merupakan sesuatu yang makar. Dan juga Bernard Abdul Jabbar ia merupakan tokoh aksi dari gerakkan 212. Dan juga merupakan seorang yang berhubungan baik dengan Habieb Rizieq. Ia sangat mendukung gerakan *people power* 2019. Ia salah satu perwakilan dari keagamaan yang memang pernah menjadi korlab dalam gerakan aksi 212 yang tempo dulu pernah memprotes ahok yang di duga melakukan penistaan agama. Menurutnya beliau siap menjadi korlap dalam gerakan *people power* yang rencananya akan di gelar ada 22 Mei itu.

Keempat, aktor lain yakni dari kolompok tokoh masyarakat yang diwakili oleh Titiek Soeharto. Titiek Soeharto merupakan mantan istri dari Prabowo Subianto dan juga anak keempat dari Presiden Soeharto. Ia menjabat sebagai wakil ketua MPR itu merupakan karir tertinggi sejak beliau terjun di dunia politik dan sebelum itu beliau memang sangat aktif di dalam kegiatan sosial diantarannya pernah menjabat sebagai ketua Yayasan Seni Indonesia. Di

[104] Tsarina Maharani, *"Fahri:Seruan People Power Amien Rais Peringatan Keras,* (https://m.detik.com/news/berita/d-4493128/fahri-seruan-people-power-amien-rais-peringatan-keras, Diakses pada tanggal 26 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lihat dari latar belakangnya sendiri memang Titiek ini lahir dari keluarga yang berpolitik. Maka tidak heran dari kompeten yang di punya beliau berani memberikan pendapat tentang *people power* yang beliau sendiri sangat mendukung terhadap gerakan tersebut. Beliau menghimbau bahwa aksi tersebut dilakukan dengan damai memang protes itu melibatkan banya massa akan tetapi dilakukan secara damai kecuali aparat keamanan bertindak represif.[105]

Kelima, aktor yang kompetan dalam gerakan ini yang mewakili pengamat dalam berpendapat tentang *people power* yakni Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK. Sebelum itu Mahfud MD juga merupakan anggota dari DPR sejak mudah beliau memang lebih suka ilmu politik hukum karena sempat menjadi Guru Besar pada tahun 2000. Dan beliau juga pernah menjadi menteri pertahanan dalam masa Presiden Gusdur. Dari semua latar belakang yang di milikinya maka tidak heran bahwa Mahfud MD berkomentar mengenai *people power*. beliau sangat kompeten dalam ilmu politik oleh karena itu penulis meletakkan Mahfud MD sebagai perwakilan dari pengamat politik. Mahfud MD menganggap bahwa *people power* itu semacam hak milih rakyat untuk tujuan perubahan. Jadi *people power* harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh konstitusi hukum yang menjamin kebenaran. Masyarakat diminta agar tunduk sesuai konstitusi dan jangan sampai ada tindakan yang di luar konstitusi. [106]

---

[105] *"BPN Gelar Aksi Damai Bukan People Power, Tapi Dilakukan 3 Hari. FPI Pastikan Ikut Serta Setiap Hari",* (https://wartakota.tribunnews.com/2019/05/18/bpn-gelar-aksi-damai-bukan-people -power-tapi-dilakukan-3-hari-fpi-pastikan-ikut-serta-setiap-hari, Diakses pada tanggal 25 Desember 2019.

[106] Ristu Hanafi, "*Mahfud MD: Rakyat Sudah Lakukan People Power", Kita Terima Hasilnya*, (https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4517177/mahfud-md-rakyat-sudah-lakukan-people-power-kita-terima-hasilnya, Diakses pada tanggal 25 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kompetensi yang dimiliki oleh para aktor gerakan *people power* maka bisa ditarik hubungan dengan teori kuasa Michel Foucault. bahwasannya kekuasaan itu merupakan bentuk dari strategi. Oleh karena itu para aktor mempunyai berbagai kompeten dalam bidang kekuasaan yang berbeda-beda. Itu merupakan suatu strategi yang digunakan oleh penguasa dalam menguatkan gerakan *people power* tersebut. karena dapat menghasilkan massa yang lebih banyak kalau dilakukannya strategi yang menyeluruh dari setiap relasi yang ada di dalam masyarakat tersebut.

C. Pandangan Teori Kuasa Michel Foucault Terhadap Aksi "People Power" 2019.

Gerakan "People Power" pada awalnya bermaksud baik karena istilah *People Power* sendiri yakni adalah sebuah penggulingan atas kekuasaan presiden melalui aksi demokrasi rakyat. Karena presiden bertindak otoriter dan melakukan konstitusi atau penyimpangan. Seperti contoh pada tahun 1998 ketika masyarakat berdemonstrasi untuk menjatuhkan presiden Soeharto. Secara garis besar memang *people power* sama artinya dengan kekuatan rakyat.

Tapi di sini yang menjadi fokus penting dari peneliti yakni gerakan *people power* pasca pilpres 2019. Wacana itu muncul karena salah satu capres mengklaim bahwasannya pemilu curang dan memobilisasi kekuatan massa terhadap masyarakat. Pihak 02 juga mengklaim bahwasannya bawaslu menggunakan pengguna dari aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan petahana dalam pemilu pilpres 2019. Dan wacana ini juga didorong oleh salah satu BPN 02 yakni Amien Rais dan juga didukung oleh beberapa pihak antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain kelompok dari partai politik, kelompok agamawan, tokoh masyarakat dan juga para pengamat politik yang mengomentari tentang gerakan aksi *People power* 2019. Mereka semua merupakan barisan para kelompok yang memang mempunyai banyak pengetahuan dan strategi dalam memobilisasi massa terutama masyarakat dalam mendukung gerakan aksi *people power* 2019 tersebut.

Terlepas dari itu semua adapun teori kuasa itu bahwasannya menurut Foucault Kekuasaan tidak seperti kedaulatan yang ada di dalam negara atau sistem hukum yang menjadi dominasi di dalam negara tidak juga kekuasaan yang di miliki dalam setiap individu atau kelompok secara menyeluruh. Dengan hal tersebut maka kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi-relasi kekuatan yang terdapat dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi dimana relasi kekuatan adalah efeknya.[107] Disini yang menjadi fokus dari teori Foucault yakni tentang mekanisme-mekanisme kuasa dan strategi kuasa, ada 4 konsep tentang teori kuasa Michel Foucault yang ingin penulis analisis dalam gerakan aksi *people power* 2019 antara lain :

[107] Abdullah Khozin Af, "*Konsep Kekuasaan Michel Foucault"* . Teosofi : Jurnal Tasawuf dan pemikiran islam. Vol. 2 No. 1 Juni 2012, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Kuasa Bukanlah Milik melainkan strategi**

Dalam pandangan Michel Foucault kuasa tidak dimiliki tetapi dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan mengalami pergeseran.[108]

Dari hubungannya dengan gerakan aksi *People power* 2019. Bahwasannya terdapat seorang penguasa yang dengan sengaja melontarkan gerakan itu. Karena memang pada pasca pemilu 2019 terdapat dugaan kecurangan maka dari itu timbulah gerakan aksi *people power* dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya kecurangan di dalam pemilu 2019. Di sini dalam konsep Michel Foucault kuasa bukanlah milik melainkan strategi akan tetapi dalam gerakan *people power* 2019. Wacana tersebut hanya sebatas ucapan saja penguasa terhadap oposisi-oposisi masyarakat awam dan tidak adanya strategi yang jelas untuk membangun gerakan tersebut. hanya dengan klaim-klaim kecurangan saja yang diucapkan oleh penguasa. Menurut penulis tidak adanya strategi yang baik maka aksi ini sebatas gerakan moral saja dalam melakukan gerakan *people power* terhadap pemilu 2019 dan berakibat mengalami kegagalan.

2. **Kuasa tidak dapat dilokalisasikan tetapi terdapat dimana-mana**

Biasanya kuasa dikaitkan dengan orang atau lembaga tertentu, khususnya aparat negara. Tetapi menurut Foucault strategi kuasa berlangsung di mana-mana. Di mana saja terdapat susunan aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain dan

[108]K. Bartens, *Filsafat Barat Kontemporer*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dunia, di situ pun kuasa sedang berkerja. Kuasa tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan dan hubungan-hubungan itu dari dalam malah memungkinkan semua itu.[109]

Dari definisi teori Michel Foucault di atas bahwasannya kuasa tidak dapat dilokalisasikan tetapi terdapat dimana-dimana. Di sini akan penulis analisis dengan gerakan aksi *people power* 2019. Maka menurut penulis memang kekuasaan itu terdapat dimana-mana dan menyebar khusunya untuk orang yang memang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dibanding lainnya.

Oleh karena itu gerakan *people power* ini didukung oleh beberapa pihak dari kelompok yang berbeda-beda dengan satu keyakinan yakni mendukung gerakan *people power* 2019. Akan tetapi di sini yang menjadi permasalahan bahwasannya *people power* ini ramai diperbincangkan hanya di tempat tertentu saja seperti contoh di Jakarta.

Artinya *people power* ini hanya dilakukan tidak diseluruh bangsa Indonesia akan tetapi di tempat-tempat yang memang mendukung gerakan tersebut. menurut penulis bahwannya gerakan *people power* ini dapat dilokalisasikan karena hanya terdapat di beberapa kota saja tidak terdapat dimana-mana khsusnya di seluruh bangsa Indonesia.

[109] Ibid., 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kuasa tidak bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi

Menurut Foucault kuasa itu tidak bekerja dengan cara negatif dan represif, melainkan dengan cara positif dan produktif. Kata Foucault : kita harus berhenti meluikiskan akibat-akibat kuasa secara negatif seolah-olah kuasa meniadakan, merepresi, mensensor, mengabstraksikan, menyelubungi dan menyembunyikan. Pada kenyataannya semua itu salah karena kuasa itu memproduksi. Kuasa memproduksi realitas, memproduksi ruang lingkup obyek dan ritus-ritus kebenaran.[110]

Dari konsep ketiga Michel Foucault ini bahwasannya kuasa tidak bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi dari hubungannya antara teori kuasa Michel Foucault dengan *people power* 2019 yakni *peolpe power* ini dilakukan untuk tujuan sebagai bentuk protes terhadap KPU yang bertindak curang pada pilpres 2019. Gerakan ini hanya untuk sebagai antisipasi adanya kecurangan dalam pilpres.

Akan tetapi dari itu semua tidak dapat fakta kebenaran bahwa memang pilpres 2019 ini curang. Disini menurut teori Michel Foucault kuasa itu tidak selalu bertindak dengan cara penindasan atau represif tetapi dengan cara normalisasi. Artinya gerakan *people power* ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu hanya dengan tujuan melakukan bentuk protes terhadap KPU karena terdapat kecurangan dengan tidak adanya bukti yang benar para

[110] Ibid., 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok-kelompok ini dengan enaknya mengklaim bahwasannya pemilu curang.

Menurut penulis teori kuasa Michel Foucualt ini bekerja secara normalisasi tidak secara penindasan dan represif. artinya *people power* ini dilakukan dengan cara penindasan dan represif karena tidak adanya Ritus-ritus kebenaran yang membukikan bahwasannya pilpres 2019 telah terjadi kecurangan. Hanya sebatas opini-opini kelompok saja yang mengatakan bahwasannya pemilu 2019 ini telah terjadi kecurangan dan menuduh KPU melakukan kecurangan maka dari itu timbulah aksi gerakan *people power* 2019.

4. Kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif

Menurut Foucault Kuasa tidak mungkin menghancurkan melainkan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak sedikit pendapat bahwa kuasa itu bersifat sesuatu yang jahat dan harus ditolak. Tetapi dengan menolak kuasa merupakan bentuk dari strategi kuasa itu sendiri. Karena tidak mungkin memilih tempat di luar kekuasaan strategi itu. Kuasa itu produktif, kuasa memungkinkan segala sesuatu.[111]

Dari konsep ke 4 teori kuasa Michel Foucault bahwa kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif maka di tarik hubungannya dengan gerakan aksi *people power* 2019. maksud dari konsep tersebut bahwa kekuasaan itu bersifat produktif yakni menghasilkan sesuatu yang baik apabila destruktif bersifat menghancurkan dan bisa menghasilkan sesuatu yang jahat.

[111] Ibid., 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis *people power* bertujuan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam pemilu 2019. Karena pihak 02 mengklaim bahwasannya pemilu telah terjadi kecurangan secara terstuktur, sistematif dan massif. Semua itu dilakukan dengan bentuk protes terhadap KPU karena bertindak curang agar dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Pihak 02 melakukan gerakan *people power* dengan cara memobilisasi massa dan juga didukungnya gerakan itu oleh berbagai kelompok dari kalangan tertentu. mereka semua yang memang mendukung gerakan *people power* mengatakan bahwa gerakan ini hanya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi saja karena telah terjadi kecurangan di dalam pemilu 2019.

Menurut penulis yang menjadi permasalahan di sini apabila di hubungkan dengan konsep ke 4 dari Michel Foucault yakni *people power* ini tidak bersifat produktif melainkan destruktif karena di sini *people power* hanya bergerak di satu sisi saja yang memang mendukung gerakan itu. Menurut penulis gerakan ini memang bersifat destruktif karena dapat menghancurkan berbagai pihak tertentu khususnya masyarakat. Dari gerakan ini maka timbulah suatu ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU yang memang KPU adalah pusat yang mengatur semua dalam pemilu pilpres 2019. KPU dituduh oleh pihak 02 yang seakan-akan melakukan kecurangan karena tidak netral. Itu adalah analisis penulis dari gerakan *people power* 2019 dengan konsep Michel Foucault yang ke 4 yang memang gerakan ini bersifat destruktif bukan produktif.

Menurut penulis dalam analisisnya Teori kuasa Foucault dengan gerakan aksi *people power* sendiri memiliki makna yakni Menurut Foucault kekuasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak merupakan bentuk struktur atau bukan semacam lembaga, tidak juga daya kekuatan yang terdapat pada beberapa orang saja. Melainkan kekuasaan merupakan nama yang diberikan kepada masyarakat tertentu yang mengalami situasi strategis yang rumit. Kekuasaan lahir dari mikro yang terpisah dan menyebar.[112]

Lebih jelasnya dalam ide Michel Foucault tentang kekuasaan yakni ide kekuasaan Foucault beroperasi sebagai pemerintahan yang mempunyai kuasa. sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan yang tersebar menyeluruh di dalam masyarakat yang berkerja mempengaruhi setiap manusia. Maka dari itu kekuasaan tidak hanya milik negara karena Kekuasaan itu ada di mana-mana karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi, di mana ada relasi di sana ada kekuasaan yang bekerja.[113]

Itu adalah sekilas dari definisi Michel Foucault tentang teori kuasa akan tetapi di sini yang menjadi pijakan utama dari teori tersebut ada 4 konsep yang menurut penulis bisa dijadikan hubungan antara teori kuasa Michel Foucault dengan gerakan *people power* 2019. Dari semua penjelasan di atas tentang 4 konsep Michel Foucault penulis menyimpulkan bahwasannya dari semua teori tersebut dengan *people power* tidak begitu ada hubungan karena *people power* 2019 ini lebih sedikit menyimpang dari konsep kuasa Michel Foucault.

Pertama, (kuasa bukanlah milik melainkan strategi) gerakan *people power* yang di rencanakan oleh pihak 02 tidak begitu mempunyai sebuah strategi pengetahuan yang baik karena hanya bersifat menuduh dan mencurigai KPU

[112] Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu (Jakarta : PT Gramdia, 1997), 115.
[113] Abdullah Khozin Af, "*Konsep Kekuasaan Michel Foucault"* . Teosofi : Jurnal Tasawuf dan pemikiran islam. Vol. 2 No. 1 Juni 2012, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan kecurangan. Tidak adanya strategi yang baik karena hanya melakukan sebuah mobilisasi massa dan juga sebatas geraka moral yang di ucapkan oleh kelompok 02 yang menyebutkan bahwa KPU telah curang dalam pilpres 2019 tanpa adanya bukti yang cukup jelas.

Kedua, (kuasa tidak dapat dilokalisasikan tetapi terdapat di mana-mana) gerakan *people power* 2019 memang didukung oleh beberapa kelompok tertentu akan tetapi di sini yang menjadi permasalahan bahwa *people power* ini ramai diperbincangkan di ruang lingkup dalam jakarta saja tidak sampai di seluruh Indonesia. Karena gerakan ini hanya didukung oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu saja.

Ketiga, (kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi) gerakan *people power* ini bersifat represi dan penindasan karena di dasarkan atas ketidapuasan pihak 02 dengan mereka menuduh KPU melakukan kecurangan tanpa bukti yang nyata. Penindasan artinya ketidakpuasan ini di umumkan kedalam masyarakat dengan fakta bahwa KPU telah melakukan kecurangan dalam pilpres 2019. Pihak 02 ingin masyarakat tau bahwa pilpres telah terjadi kecurangan secara Terstuktur, Sistematis dan massif.

Keempat, (kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif) gerakan *peole power* memang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu karena menganggap bahwa KPU telah curang. Dilakukannya gerakan tersebut untuk mengantisipasi adanya kecurangan di dalam pilpres 2019. *People power* 2019 ini bersifat destruktif karena dapat menghasilkan keburukan yakni memecah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Indonesia untuk tidak percaya pada KPU. Karena memang gerakan *people power* tidak di dasari dengan bukti yang cukup jelas hanya bersifat dugaan dan menuduh saja.

Itu adalah analisis yang dapat penulis sampaikan dari hubungan gerakan *people power* dan teori kuasa Michel Foucault. Bahwa ternyata memang tidak ada hubungan antara teori kuasa dengan *people power*. karena gerakan ini hanya sebagai wujud subyektif dari kuasa yang lebih bersifat menyimpang dan menuduh pemerintahan KPU dengan mengklaim kecurangan serta juga memobilisasi masyarakat untuk mempercayai frasah-frasah yang dibuat oleh pihak 02 tentang gerakan *people power* 2019 dalam menuduh KPU tanpa bukti yang cukup jelas. Gerakan ini hanya bersifat gerakan moral saja atas tidak terimanya kekalahan pendukung 02 dalam pilpres 2019.

Memang gerakan ini didukung oleh beberapa kelompok yang mempunyai massa yang begitu banyak seperti contoh Amien Rais yang merupakan perwakilan dari BPN 02, Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang merupakan perwakilan dari partai politik, Habib Rizieq (FPI) yang merupakan perwakilan dari kelompok agamawan serta Titiek Soeharto yang merupakan seorang tokoh masyarakat. Memang dari semua golongan tersebut sama-sama mendukung *people power* karena hanya sekedar penyampaian aspirasi saja yang merupakan wujud dari subyektif dari kuasa sendiri dan juga tidak ada langkah-langkah dalam teori kuasa yang memuat gerakan itu semua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian permasalahan dan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis akan memaparkan sebuah kesimpulan yang menyangkut atas tema yang dibuat sebagai berikut :

Pertama, dari rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis terkait bagaimana munculnya gerakan aksi *people power* pasca pilpres 2019. *people power* sendiri merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang bertindak otoriter dan merugikan masyarakat, *people power* sendiri dapat diartikan sebagai kekuatan masyarakat. menurut penulis di sini munculnya gerakan *people power* karena ada dugaan kecurangan di dalam pemilu 2019. Dan wacana itu diungkapkan oleh kelompok 02 yang tidak percaya dengan hasil pemilu dan serta menolak hasil pemilu karena terdapat kecurangan secara terstuktur, sistematis dan masif.

Dan *people power* 2019 ini dipicu oleh para kelompok elit politik di Indonesia yang berkompeten dalam bidang yang berbeda-beda yakni dari BPN sendiri yang diwakili Amien Rais dan Eggi Sudjan, dari Partai Politik yang diwakili yakni oleh Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dari kelompok Keagamaan yang diwakili oleh Habieb Rizieq dan Bernard Abdul Jabbar, dari tokoh masyarakat yang mewakili yakni Titiek Soeharto dan pengamat politik yang mewakili yakni Mahfud MD kelompok tersebut tidak bermaksud untuk membuat kericuan melainkan ajakan untuk bersama-sama mengawal demokrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar berjalan secara sehat dan konstitusional. *People Power* sendiri memang di istilahkan sebagai penyampaian pendapat tetapi harus tetap melalui mekanisme dan koridor hukum yang sudah ada, karena bisa dikatakan sebagai tindakan makar. Menurut kelompok dan masyarakat tertentu semua itu untuk mengantisipasi adanya kecurangan di dalam pilpres 2019. Intinya dari kesimpulan ini bahwasannya *people power* 2019 itu tidak digunakan untuk menggulingkan kekuasaan yang sudah ada. Hanya semata-mata sebagai bentuk protes rakyat terhadap pemerintah apabila kecurangan benar-benar terjadi.

Kedua, sesuai dengan jawaban rumusan masalah yang berkaitan yakni analisis teori Kuasa Michel Foucault terhadap gerakan aksi *people power* pasca pilpres 2019, menurut penulis analisis sebuah gerakan *people power* dan teori kuasa ini ternyata memang tidak ada hubungannya dengan gerakan *people power* 2019. Dari definisi 4 konsep teori kuasa Michel Foucault yang ada di sini penulis simpulkan bahwasannya gerakan *people power* ini tidak ada strategi pengetahuan yang jelas karena hanya mengklaim kecurangan dan mencurigai bahwasannya terjadi kecurangan dalam KPU, dan juga gerakan ini tidak terdapat dimana-mana melainkan hanya terdapat di ruang lingkup jakarta saja, gerakan *people power* ini lebih bersifat subyektif karena hanya di jalankan oleh salah satu aktor dari berbagai kelompok saja serta juga gerakan *people power* ini lebih bersifat destruktif karena menghasilkan sesuatu yang tidak baik seperti contoh menuduh KPU melakukan kecurangan dengan memobilisasi massa untuk ikut bergerak dalam gerakan *people power* 2019 yang direncanakan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Intinya bahwa memang gerakan *people power* merupakan wujud subyektif dari kuasa dan juga hanya sebatas gerakan moral saja yang dilakukan oleh para aktor pendukung pihak 02 karena mencurigai adanya kecurangan di dalam pihak KPU dan juga dengan dalil-dalil islam yang dilakukan untuk memobilisasi masyarakat semata-mata hanya sebatas fitnah dan tuduhan saja yang dilakukan terhadap pemerintahan KPU yang bertugas melaksanakan pemilu pada 2019 karena pihak 02 takut akan kekalahan yang diterima dalam pilpres 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Selanjutnya dengan penulisan dan penelitian tersebut dapat memberi kemudahan akademisi dalam peneliti lain yang memang mempunyai tema berkaitan khsusunya terhadap mahasiswa kampus UINSA dan tak lain juga di luar kampus UINSA. Maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saya berharap kepada akademisi yang memang ingin melanjutkan permasalahan ini kalau memang lebih menarik lagi memang dibutuhkan sebuah penelitian langsung di lapangan sehingga data-data yang akan didapat dalam membuka permasalahan akan lebih terlihat. Secara jelas apa yang menjadikan permasalahan itu sempat menjadi banyak perbincangan di dalam masyarakat indonesia sebelum pilpres dan sesudah pilpres.
2. Dan juga diharapkan lebih memperluas dan memperdalam sebuah penguatan teori analisis tersebut. karena permasalahan akan selalu ada atau akan begitu banyak kedepannya dan pengetahuan juga mengalami sebuah perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aminah, Siti. *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal.* Jakarta:KENCANA, 2014.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Yogyakarta:RINEKA CIPTA, 1992.

Bartens, K. *Filsafat Barat Kontemporer.* Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2001.

Foucault, Michel. *Power/Knowladge:Wacana Kuasa/Pengetahuan.* Yogyakarta:Bintang Budaya, 2002.

Foucault, Michel. *Seks dan Kekuasaan.* terj. S.H. Rahayu. Jakarta:PT Gramedia, 1997.

Joenitro. *Demokrasi dan Sistem Negara.* Jakarta:PT RINEKA CIPTA,2000.

Martono, Nanang. *Metode Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder.* Jakarta:Rajawali, 2014.

Santoso, Listiyono. *Epistemologi Kiri.* Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2006.

Syamsudin, HARIS. *Demokrasi di Indonesia : gagasan dan pengalaman.* Jakarta:Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.

Jurnal :

Af Khozin, Abdullah. "Konsep Kekuasaan Michel Foucault". *Teosofi:Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam,* Vol. 2, No. 1(Juni, 2012).

Kamahi, Umar. "Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik". *Jurnal Al-Khitabah,* Vol. III, No. 1(Juni, 2017).

Internet :

Arief Budiman, "Kpu Tetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pilpres 2019", dalam https://kominfo.go.id/content/detail/18852/kpu-tetapkan-rekapitulasi-perolehan-suara-nasional-pilpres-2019/0/berita Diakses 28/06/2019.

"Apa Itu People Power" dalam https://m.wartaekonomi.co.id/berita225169/apa-itu-people-power.html, Diakses 30/06/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Albari Subhan, “Ajakan ‘People Power’ Habib Rizieq Tidak Laku”, dalam https://www.obsessinnews.com/ajakan-people-power-habib-rizieq-tidak-laku, Diakses pada 01/10/2019.

“BPN Gelar Aksi Damai Bukan People Power, Tapi Dilakukan 3 Hari. FPI Pastikan Ikut Serta Setiap Hari”, dalam https://wartakota.tribunnews.com/2019/05/18/bpn-gelar-aksi-damai-bukan-people -power-tapi-dilakukan-3-hari-fpi-pastikan-ikut-serta-setiap-hari, Diakses pada 25/12/2019.

Denny Siregar “Bisakah Prabowo Menggerakkan People Power”, dalam https://www.tagar.id/bisakah-prabowo-menggerakkkan-people-power, Diakses pada 30/06/2019.

“Ditetapkan sebagai tersangka ‘people power’,Eggi Sudjana bantah lakukan ‘ajakan makar”, dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48211173, Diakses pada 21/12/2019.

Fahrul Muzaqqi, “People Power” dan Sumbatan Demokrasi”, dalam https://m.detik.com/news/kolom /d-4560206/people-power-dan-sumbatan-demokrasi, Diakses pada 28/09/2019.

Fadel Prayoga,”Tolak People Power, Gerakan BEM Jakarta Sebut Banyak Dampak Negatifnya”, dalam https://news.okezone.com/read/2019/05/16/605/2056683/tolak-people-power-gerakan-bem-jakarta-sebut-banyak-dampak-negatifnya, Diaksess pada 8/10/2019.

Faizal Fanani, “Jokowi Tanggapi People Power 22 Mei : Jangan Aneh-anehlah” dalam https://m.merdeka.com/politik/jokowi-tanggapi-people-power-22-mei-jangan-aneh-anehlah.html, Diakses pada 29/06/2019.

H33, “Amien Bertenaga Untuk People Power” dalam https://pinterpolitik.com/amien-bertenaga-untuk-people-power/, Diakses pada 29/06/2019.

Ilyas Listianto Mujib, “Kontroversial, BPN Jelaskan Maksud People Power dari Amien Rais” dalam, https://www.idntimes.com/news/indonesia/ilyas-listianti-mujib-1/penjelasan-people-power-amien-rais, Diakses pada 30/06/ 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ini Pengertian "People Power" Versi Amien Rais Bukan Untuk Jatuhkan Presiden", dalam https://kupang.tribunnews.com/2019/05/25ini-pengertian-people-power-versi-amien-rais-bukan-untuk-jatuhkan-presiden, Diakses pada 30/06/2019.

Jessi Carina, "Fadli Zon : Saya Melihat "People Power" Biasa-biasa Saja", dalam https://nasional.kompas.com/read/2019/05/14/17105271/fadli-zon-saya-melihat-people-power-biasa-biasa-saja, Diakses pada 21/12/2019.

M39, "Mengintip Isi Kepala Fadli Zon", dalam https://www.pinterpolitik.com/mengintip-isi-kepala-fadli-zon/, Diakses pada 21/12/2019.

Marisa Safitri, "Sejarah Kemunculan People Power dan Hubungannya dengan Indonesia", dalam https://www.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/sejarah-kemunculan-people -power-dan-hubungannya-dengan-indonesia, Diakses pada 08/10/2019.

Mouzila K.Donna Sweinstani, "People Power dalam Dinamika Elektoral", dalam https://kolom.tempo.co/read/1208766/people-power-dalam-dinamika-elektoral/full?view=ok, Diakses pada 08/10/2019.

"Moeldoko Ungkap Skenario dan Dampak Buruk Gerakan People Power 22 Mei 2019 : Ini Bukan Hal Main-Main", dalam https://wartakota.tribunnews.com/2019/05/20/moeldoko-ungkap-skenario-dan-dampak-buruk-gerakan-people-power-22-mei-2019-ini-bukan-hal-main-main, Diakses pada 28/09/2019.

Nancy Junita, "Alasan Habib Rizieq Shihab 'People Power'Konstitusional dan Bukan Makar", dalam https://m.bisnis.com/kabar24/read/20190423/15/914536/alasan-habib-rizieq-shihab-people -power-konstitusional-dan-bukan-makar, Diakses pada 21/12/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Okky Budi, “Karier Akademik dan Politik Amien Rais yang Patut Diacungi Jempol”, dalam https://www.moneysmart.id/prestasi-karier-amien-rais/, Diakses pada 21/12/2019.

People Power Amien Rais, Gertakan dari Orang Tak Terpakai”, dalam https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190401105414-32-382494/people-power-amien-rais-gertakan-dari-orang-tak-terpakai, Diakses pada 21/12/2019.
“People Power Ganti Istilah Jadi Gerakan Kedaulatan Rakyat”, dalam https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190514185611-32-394857/people-power-ganti-istilah-jadi-gerakan-kedaulatan-rakyat, Diakses pada 8/10/2019.
“People Power, Jalan Menuju Jurang Kekacauan”, dalam https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190520073757-32-396363/people-power-jalan-menuju-jurang-kekacauan, Diakses pada 27/09/2019.
”People Power, Gerakan Layu Sebelum Berkembang”, dalam https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190516164035-32-395501/people-power-gerakan-layu-sebelum-berkembang, Diakses pada 27/09/2019.
“Profil Eggi Sudjana, Tersangka Makar”, dalam https://m.tribunnews.com/nasional/2019/05/09/profil-eggi-sudjana-tersangka-makar-pengacara-rizieq-shihab-hingga-pernah-jadi-cagub-jatim?page=2, Diakses pada 21/12/2019.
Ristu Hanafi, “Mahfud MD: Rakyat Sudah Lakukan People Power”, Kita Terima Hasilnya”, dalam https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4517177/mahfud-md-rakyat-sudah-lakukan-people-power-kita-terima-hasilnya, Diakses pada 25/12/2019.
Tsarina Maharani “Kapolri Bicara Soal ‘People Power’,Ingatkan Ada Ancaman Pidana”, dalam https://m.detik.com/news/berita/d-4539495/kapolri-bicara-soal-people-power-ingatkan-ada-ancaman-pidana, Diakses pada 30/06/2019.
Tony Firman, “Seruan People Power Amien Rais dan Kegagalan People Power”, dalam https://tirto.id/seruan-people-power-amien-rais-dan-kegagalan-people-power-dkV4, Diakses pada 08/10/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tsarina Maharani, “Fahri:Seruan People Power Amien Rais Peringatan Keras”, dalam https://m.detik.com/news/berita/d-4493128/fahri-seruan-people-power-amien-rais-peringatan-keras, Diakses pada 26/12/2019.

Yuliawati dan Fahmi Ramadhan, “Gerakan People Power, Siasat Terakhir Prabowo Jelang 22 Mei” dalam https://katadata.co.id/berita/2019/05/13/gerakan-people-power-siasat-terakhir-prabowo-jelang-22-mei Diakses pada 28/06/2019.

Yusril Ihza Mahendra, “People Power” Akhirnya Akan Mencari Legitimasi Konstitusional”, dalam https://m.detik.com/news/kolom/d-4555740/people-power-akhirnya-akan-mencari-legitimasi-konstitusional, Diakses pada 28/09/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id